

30



PAMERAN

1-1 APR 2003

136

LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2000

**EKONOMI POLITIK PEMERINTAHAN GUS DUR: STUDI TENTANG
RELASI EKONOMI DAN POLITIK DALAM PEMERINTAHAN BARU
DI INDONESIA**

Peneliti :

Drs. SUTRISNO, M.S.
Drs. KACUNG MARIJAN, M.A.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga
SK Rektor Nomor : 4934/J03/PG/2000
Tanggal 13 Juni 2000
Nomor urut : 21

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Desember 2000

1. ECONOMIC DEVELOPMENT

2. INDONESIA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
ECONOMICS

1-KKB
Rk-2

338.959.8

Sut
e



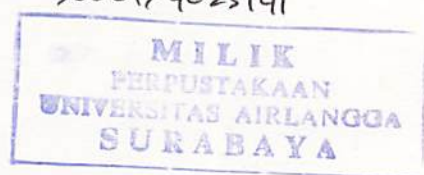
LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2000

EKONOMI POLITIK PEMERINTAHAN GUS DUR: STUDI TENTANG RELASI EKONOMI DAN POLITIK DALAM PEMERINTAHAN BARU DI INDONESIA

Peneliti :

Drs. SUTRISNO, M.S.
Drs. KACUNG MARIJAN, M.A.

3000174023141



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga

SK Rektor Nomor : 4934/J03/PG/2000

Tanggal 13 Juni 2000

Nomor urut : 21

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Desember 2000



LEMBAGA PENELITIAN

1. Puslit Pembangunan Regional
2. Puslit Obat Tradisional
3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584)
4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)
5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720)
6. Puslit/Studi Wanita (5995722)
7. Puslit Olah Raga
8. Puslit Bioenergi
9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719)
10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995246
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian	: Ekonomi Politik Pemerintahan Gus Dur : Studi Tentang Relasi Ekonomi dan Politik Dalam Pemerintahan Baru Di Indonesia
b. Macam Penelitian	: () Fundamental, () Terapan, (V) Pengembangan
c. Katagori Penelitian	: () I () II (V) III
2. Kepala Proyek Penelitian	
a. Nama Lengkap dan Gelar	: Drs. Sutrisno, MS.
b. Jenis Kelamin	: Laki-Laki
c. Pangkat/Golongan dan NIP	: Penata Tk. I (Gol. III/d) 130 937 951
d. Jabatan Sekarang	: Staf Pengajar
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	: FISIP
f. Univ./Inst. /Akademi	: Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu Yang Diteliti	: Ekonomi Politik
3. Jumlah Tim Peneliti	: 2 (dua) orang
4. Lokasi Penelitian	: Surabaya dan Jakarta
5. Kerjasama dengan Instansi Lain	
a. Nama Instansi	: -
b. Alamat	: -
6. Jangka Waktu Penelitian	: 6 (enam) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan	: Rp 2.600.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian	
a. Dilaksanakan Tanggal	: 26 Januari 2001
b. Hasil Penelitian	: () Baik Sekali () Baik (V) Sedang () Kurang

Surabaya, 26 Januari 2001



Mengetahui/Mengesahkan :
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP. 130 701 125



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Ringkasan	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	6
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	7
BAB III: TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	12
1. Tujuan	12
2. Manfaat	12
BAB IV: METODA PENELITIAN	13
1. Tipe Penelitian	13
2. Unit Analisis Penelitian	13
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Teknik Analisis Data	14
BAB V: TEMUAN DAN ANALISIS DATA	15
1. Bangunan Negara atau Pemerintahan Gus Dur	15
1.1. Jatuhnya Pemerintahan Soeharto dan Pemilu 1999	15
1.2. SU MPR dan Terpilihnya Gus Dur Sebagai Presiden	25
1.3. Kesulitan Konsolidasi	31
2. Bangunan Ekonomi Pemerintahan Gus Dur	36
2.1. Warisan Pemerintahan Orde Baru	36
2.2. Ekonomi Pemerintahan Gus Dur: Sulit Menembus Jalan Buntu	43
2.3. Relasi Ekonomi dan Politik	46
BAB VI: PENUTUP	49
Simpulan dan Saran	49
1. Simpulan	49
2. Saran	50
LAMPIRAN	52
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Nilai Eksport Non-Migas Menurut Kelompok Barang (Ribu USD)	52
Rencana Penanaman Modal Asing (PMA) Yang Disetujui Pemerintah Menurut Sektor (Juta \$)	55
Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Yang Disetujui Pemerintah Menurut Sektor (Miliar Rp)	59
Rencana Penanaman Modal Asing (PMA) Yang Disetujui Pemerintah Menurut Negara Asal (Juta \$)	63
Pertumbuhan Ekonomi Tujuh Negara Industri Utama dan Beberapa Negara Asia (Persen pertahun/Persen perannum).....	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1, Hasil Pemilu 1999	26
Tabel 2, Kondisi Hutang Luar Negeri Indonesia	44

KATA PENGANTAR

Format ekonomi politik di Indonesia selama ini masih dikenal belum baik. Karena itu, adanya gerakan reformasi yang membawa perubahan-perubahan di dalam pemegang kekuasaan di Indonesia, diharapkan bisa membawa angin segar. Munculnya pemerintahan baru pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekamoputri, diharapkan bisa membawa perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk itu kami tertarik untuk mengkaji format ekonomi politik pemerintahan baru ini.

Memang, pemerintahan baru ini masih berumur pendek. Tetapi, melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran awal tentang ekonomi politik Indonesia ke depan. Penelitian ini sendiri tidak akan dapat dilaksanakan tanpa bantuan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, karena itu kami mengucapkan terimakasih. Meskipun di dalam penelitian ini terdapat kekurangan-kekurangan, kami berharap hasilnya bisa bermanfaat, sebagai bahan kajian di bidang ekonomi politik.

Surabaya, awal Januari 2001

Peneliti

RINGKASAN

EKONOMI POLITIK PEMERINTAHAN GUS DUR: Suatu Studi tentang Relasi Ekonomi dan Politik dalam Pemerintahan Baru di Indonesia (Sutrisno, 2001, 67 halaman)

Munculnya pemerintahan baru pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri yang dipilih melalui proses pemilu yang relatif demokratis telah membawa banyak harapan. Rakyat tidak hanya berharap pemerintahan baru ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih demokratis. Mereka juga berharap agar krisis ekonomi dan moneter segera terselesaikan. Dalam kerangka yang lebih luas, pemerintahan baru ini diharapkan bisa membawa perubahan-perubahan terhadap *performance* ekonomi politik Indonesia, ke arah yang lebih baik.

Berangkat dari harapan itu, permasalahan utama yang diangkat di dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah keterkaitan antara negara dan pasar atau politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid?". Secara khusus, permasalahan yang hendak dikaji adalah sebagai berikut: Bagaimanakah bangunan negara atau pemerintahan Indonesia pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid? Bagaimanakah bangunan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid? Sejauhmana bangunan negara mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi yang terdapat di dalam masyarakat? Sejauhmana kegiatan-kegiatan ekonomi di dalam masyarakat mempengaruhi bangunan negara?

Penelitian ini diarahkan untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan profile ekonomi politik pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Melalui gambaran demikian diharapkan, secara akademik, dapat memperoleh penjelasan yang lebih riil tentang keterkaitan antara ekonomi dan politik, yakni bagaimana saling pengaruh antara kegiatan ekonomi dan kegiatan politik. Di dalam literatur ekonomi politik, terdapat sejumlah model tentang

*) Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga; Nomor Kontrak Pelaksanaan Penelitian: 445/JO3.2/PG/2000)

keterkaitan tersebut. Dalam hubungannya dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran di dalam pemerintahan Gus Dur ini model pemikiran manakah yang berlaku, ataukah Indonesia memiliki model tersendiri.

Penelitian ini bercorak eksploratif-eksplanatif, yakni berusaha menjelaskan relasi antara berbagai kebijakan politik (state) dengan kegiatan-kegiatan ekonomi (market) di Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur. Penelitian ini memanfaatkan berbagai dokumen dan data, seperti yang dipublikasikan majalah, surat kabat dan internet, serta data resmi yang dikeluarkan pemerintah. Adapun unit analisis yang dipakai adalah nasional, artinya fenomena dan fakta-fakta yang dibahas adalah yang berskala nasional. Temuan data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dapat disimpulkan bahwa pemerintahan baru pimpinan Gus Dur belum membawa perubahan-perubahan yang berarti performance ekonomi politik Indonesia. Di samping pemerintahan Gus Dur belum berhasil membawa Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi dan moneter, pemerintahan Gus Dur juga belum mampu membangun corak politik yang lebih demokratis dan stabil. Yang terjadi kemudian, terdapat ketidakpastian politik yang ujung-ujungnya bisa mengganggu perekonomian secara keseluruhan. Pemerintahan Gus Dur ternyata juga belum mampu merombak relasi ekonomi dan politik yang bermodelkan *clientelism*. Padahal, pemerintahan baru ini diharapkan bisa membangun corak relasi yang lebih adil dan fair.

BAB I

PENDAHULUAN



1. Latar Belakang Masalah

Para analis ekonomi dan politik tidak banyak berbeda pendapat ketika memberi jawaban terhadap pertanyaan, mengapa krisis moneter dan ekonomi di Indonesia berlangsung secara berkepanjangan (Kontan, 1999). Pada umumnya mereka berpendapat bahwa pemerintah telah gagal melakukan perbaikan ekonomi, walaupun telah mengikuti berbagai preskripsi dari IMF. Hal ini terjadi karena di mata rakyat dan pasar pemerintah yang ada ketika itu dianggap tidak *credible*. Indonesia mengalami krisis politik karena pemerintahan Soeharto yang telah berkuasa lebih dari tiga dekade dianggap tidak legitimate lagi, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengatasi berbagai krisis itu tidak memperoleh dukungan dari rakyat. Sebelumnya, rakyat juga menyadari bahwa pemerintahan yang dibangun Soeharto berafaskan otoritarian. Tetapi jendral asal Yogya itu berhasil menjadikan kesadaran seperti itu berubah menjadi kesadaran palsu setelah menutupnya dengan angan-angan dan fakta bahwa pemerintahan yang dibangunnya lebih mengutamakan pembangunan ekonomi, tidak seperti pemerintahan Soekarno yang lebih mengutamakan pembangunan politik. Bangunan pemerintahan Orde Baru ini, paling tidak, terlihat dari slogan: Pembangunan=Yes, Politik=No!

Secara kasat mata, slogan pemerintah ini, dalam taraf tertentu memang dapat dibuktikan. Sejak berkuasa, sampai tahun-tahun menjelang krisis ekonomi dan moneter, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia terkatagori tinggi, rata-rata 7 % per tahun. Pendapatan perkapita Indonesia juga meningkat drastis, dari kisaran US\$ 250 pada saat jatuhnya pemerintahan Soekarno menjadi sekitar US\$ 1300 sebelum mengalami krisis. Sementara itu, seperti dikemukakan oleh Sjahrir, pemerintah Orde Baru juga relatif berhasil mencukupi kebutuhan dasar rakyat (Sjahrir, 1986). Struktur ekonomi Indonesia juga mengalami transformasi

yang cukup besar, dari *agricultural-based* menuju *industrial-based* (Hill; 1996). Hal ini terlihat dari menurunnya kontribusi sektor pertanian kepada GDP dan meningkatnya kontribusi sektor industri kepada GDP.

Tetapi, krisis moneter dan ekonomi yang terjadi sejak pertengahan 1997 telah membuka kesadaran palsu tersebut. Dalam sekejap, krisis tersebut telah menjadikan Indonesia terpuruk, dari katagori negara-negara berpenghasilan menengah ke negara-negara yang berpenghasilan rendah kembali. Dalam pandangan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terkuak kesadaran palsunya tersebut, hal ini disebabkan oleh realitas bahwa pemerintahan Soeharto telah gagal meletakkan fondasi perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia tidak bisa kokoh karena dibangun melalui relasi *clientelism* (Muhaimin, 1992; MacIntyre, 1992). Dalam relasi demikian, hanya orang-orang dan kelompok-kelompok ekonomi yang dekat dengan penguasa yang bisa cepat berkembang. Hal ini terlihat dari perbedaan yang cukup mencolok antara pendapatan golongan atas dan pendapatan golongan bawah. Tidak hanya itu, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, merebak di mana-mana. Konsekuensinya, ketika diterpa krisis, perekonomian Indonesia cepat lunglai. *Structural adjustment*, berikut upaya perbaikan lainnya, tidak membawa hasil yang menggembirakan, mengingat fundamental ekonomi Indonesia tidak cukup kuat. Ketika Soeharto turun dari puncak kekuasaan, pemerintahan baru yang menggantikannya juga menghadapi masalah yang tidak jauh berbeda. Pemerintahan Habibie juga dianggap tidak *credible* karena lahir dari proses yang tidak demokratis.

Apa yang terjadi di Indonesia itu berbeda dengan apa yang dialami oleh Thailand dan Korea Selatan, misalnya. Krisis moneter dan ekonomi yang menimpa dua negara ini tidak kalah berat dengan yang terjadi di Indonesia. Tetapi kedua negara itu cepat mengalami *recovery*. Bahkan, ketika menginjak tahun ketiga krisis, kedua negara itu berhasil mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak berbeda jauh dengan pertumbuhan sebelum terjadinya krisis. Hal ini terjadi tidak semata-mata karena di kedua negara itu memiliki fundamental ekonomi yang lebih kuat dari

Indonesia. Lebih dari itu, krisis moneter dan ekonomi yang melanda kedua negara itu tidak diikuti oleh krisis politik. Hal ini tidak lepas dari realitas bahwa kedua negara itu telah mengalami transformasi sistem politik, dari yang otoriter ke arah yang lebih demokratis. Angin demokratisasi yang melanda negara-negara Asia sejak akhir 1980an telah menerpa sejuk di kedua negara itu. Konsekuensinya, ketika terjadi krisis moneter dan ekonomi, kedua negara itu tidak lagi disibukkan oleh tuntutan demokratisasi. Energi yang dimilikinya kemudian lebih banyak dicurahkan untuk memulihkan perekonomian, bukan untuk mengatasi permasalahan politik.

Apa yang bisa ditarik dari sekilas cerita itu adalah bahwa permasalahan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari permasalahan politik, demikian juga sebaliknya. Pemahaman seperti ini pula yang membuat studi-studi ekonomi politik berkembang sehingga memberi warna tersendiri dalam kancah ilmu-ilmu sosial. Studi ini tidak berangkat dari pendekatan ekonomi murni atau politik murni. Fenomena ekonomi maupun politik dianggap sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri, melainkan berlangsung di dalam suatu ruang yang berkait antara satu dengan yang lain. Memang, bagaimana memahami relasi ekonomi dan politik itu terdapat pemahaman yang berbeda-beda di kalangan para pelaku studi ekonomi politik itu. Tetapi pandangan bahwa permasalahan ekonomi tidak berdiri sendiri telah menjadi semacam benang merah yang mempertautkan para peminat studi-studi ekonomi politik.

Sementara itu, kesadaran bahwa untuk menyelesaikan krisis moneter dan ekonomi terlebih dahulu harus menyelesaikan krisis politik berkembang kuat di Indonesia. Kesadaran demikian inilah yang melahirkan tekad untuk secepat mungkin melahirkan pemerintahan baru yang *credible*. Kesadaran demikian bukan hanya datang dari rakyat yang melek politik. Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto dan oleh sebagian kelompok masyarakat dianggap sebagai presiden yang tidak legitimate, pada akhirnya juga dipaksa memiliki kesadaran seperti itu. Paling tidak hal itu terlihat dari kesediaan dirinya untuk menganggap pemerintahan yang dipimpinnya sebagai pemerintahan transisi. Kesediaan demikian inilah yang membuat Habibie

tidak mau memaksakan diri untuk melanjutkan pemerintahannya sampai 2003 sebagaimana terdapat di dalam "konstitusi". Dia pada akhirnya menyadari bahwa tidak sedikit rakyat yang tidak mendukung pemerintahannya, karena itu mau tidak mau harus memenuhi tuntutan untuk menyelenggarakan pemilu secepat-cepatnya. Tidak hanya itu, di dalam pemerintahan Habibie itu telah muncul kecenderungan liberalisasi berbagai bidang, khususnya bidang politik, termasuk kebebasan pers. Berbagai perubahan perundang-undangan yang berbau otoriter ke arah yang lebih demokratis lahir pada masa pemerintahan Habibie, seperti perubahan UU tentang Parpol, Susduk DPR/MPR, otonomi daerah dan sejumlah undang-undang lainnya. Meskipun liberalisasi itu tidak berarti sama dengan demokratisasi, tonggak-tonggak liberalisasi politik pemerintahan Habibie sedikit banyak telah mempengaruhi kehidupan demokrasi di Indonesia pasca pemerintahan Soeharto. Betapapun Habibie yang selama ini dikenal sebagai orang yang sulit mendengarkan perkataan orang lain, ketika menjadi presiden dia dipaksa mendengarkan dan mengikuti berbagai pandangan yang terdapat di dalam masyarakat.

Itikad pemerintahan Habibie untuk menyelenggarakan pemilu setelah setahun berkuasa memang ditanggapi secara kritis. Tidak sedikit orang yang menyangsikan bahwa pemilu itu akan benar-benar berlangsung secara *luber dan jujur (free, fair and genuine)*. Dalam pandangan kelompok-kelompok kritis, tidak seluruh kelompok yang ada mendukung berlangsungnya reformasi secara menyeluruh. Masih ada kelompok-kelompok yang berkeinginan untuk mempertahankan kekuasaan lama. Maka, berkembanglah stigma adanya kelompok "pro reformasi" dan kelompok "pro status-quo". Yang pertama adalah kelompok yang berkeinginan untuk menciptakan suasana baru di dalam panggung politik Indonesia, suasana yang demokratis, sedangkan yang kedua merupakan kelompok yang ingin mempertahankan pola lama di dalam pemerintahan Indonesia. Kalaupun menginginkan perubahan-perubahan, kelompok yang disebut "pro status-quo" itu menginginkannya berlangsung secara lamban.

Tetapi, kekhawatiran itu tidak sepenuhnya menjadi kenyataan. Pemilu 7 Juni 1999 yang oleh sementara orang disebut sebagai "*the emergency election*" ternyata berlangsung relatif demokratis, jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan pemilu-pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintahan Orde Baru (The USIS, 1999). Tentu saja pemilu 1999 itu masih terdapat kekurangan-kekurangan, baik berkaitan dengan *rule of the game*, UU Pemilu berikut aturan main yang mengitarinya, maupun implementasi dari pemilu itu sendiri. Di dalam UU Pemilu yang diproduksi oleh pemerintahan Habibie itu, misalnya, tidak dimungkinkan terdapatnya proses penseleksian para kontestan pemilu yang benar-benar fair. Ketika pemilu diselenggarakan juga masih ditemui berbagai pelanggaran, termasuk berbagai kekerasan politik (Asfar dkk, 2000). Meskipun demikian pemilu 1999 itu toh dianggap berlangsung relatif demokratis. Paling tidak hal ini diakui oleh para pemantau luar negeri yang ikut mengamati pelaksanaan pemilu 1999, termasuk mantan presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter. Tidak hanya itu, pemilu 1999 itu dimenangkan oleh PDI P yang acapkali dikelompokkan sebagai "pro reformasi". Hasil pemilu itu memang masih mencemaskan para pendukung demokratisasi, karena Partai Golkar ternyata masih memperoleh suara yang cukup besar. Tetapi apabila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, secara jujur harus diakui, perolehan suara Golkar itu jauh menurun.

Berdasarkan hasil pemilu 1999 itulah MPR terbentuk dan melaksanakan persidangan guna membentuk pemerintahan yang baru. Dalam sidang ini terpilih sebagai presiden dan wakil presiden masing-masing adalah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri. Bagi para penganut demokrasi yang ideal, terpilihnya Gus Dur sebagai presiden memang disikapi secara kritis. Dalam pandangan kelompok demikian, yang ideal menjadi presiden adalah Megawati, karena partai yang dipimpin oleh Mega, PDI P, merupakan pemenang pemilu 1999. Dalam pemilu ini partai yang didirikan oleh Gus Dur, PKB, hanya memperoleh suara di urutan nomor tiga. Meskipun demikian, Gus Dur toh akhirnya diakui sebagai presiden baru Indonesia yang legitimate.

2. Rumusan Masalah

Secara umum, permasalahan yang hendak dijawab di dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah keterkaitan antara negara dan pasar atau politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid?". Secara khusus, permasalahan yang hendak dikaji adalah sebagai berikut:

- (a) Bagaimanakah bangunan negara atau pemerintahan Indonesia pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid?
- (b) Bagaimanakah bangunan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid?
- (c) Sejauhmana bangunan negara mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi yang terdapat di dalam masyarakat?
- (d) Sejauhmana kegiatan-kegiatan ekonomi di dalam masyarakat mempengaruhi bangunan negara?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam khasanah ilmu-ilmu sosial kontemporer studi ekonomi politik mengalami perkembangan yang cukup besar sejak awal 1970-an, meskipun studi demikian sebenarnya sudah lama berkembang (*long-established*). Menurut Martin Staniland perbincangan tentang ekonomi politik sudah ada pada masa Yunani Kuno, sebagaimana dilakukan oleh Aristotle tetapi baru berkembang pada abad pencerahan Staniland, 1985:6). Perkembangan yang pesat, paling tidak, terlihat pada banyaknya karya tulis yang berjudul "*the political economy of...*". Menurut Staniland, sampai pertengahan 1980-an ada 117 buku yang berjudul demikian, meskipun masalah yang dibahas sangat beragam, mulai dari periklanan sampai mengenai hak-hak asasi manusia.

Mengingat karya yang ada cukup banyak, bisa dibayangkan bahwa kerangka teoritik tentang ekonomi politik itu sendiri tidaklah homogen. Meskipun demikian, seperti halnya ilmu-ilmu sosial lainnya, di dalam ekonomi politik terdapat benang merah yang mempersatukannya.

Ekonomi politik merupakan satu dari sekian konsep yang kompleks dan memiliki variasi makna di dalam ilmu-ilmu sosial. Kompleksitas dan variasi makna ekonomi politik itu berkaitan dengan relasi ilmu ekonomi dan ilmu politik atau kegiatan ekonomi dengan kegiatan politik. Yang menjadi perhatian dari para ilmuwan yang menaruh minat pada studi ekonomi politik dengan demikian adalah bagaimana kedua bidang itu sampai terkait (*aspek ekplanasi*) dan bagaimana keduanya harus dikaitkan (*aspek normatif*). Berkaitan dengan masalah ini para ilmuwan itu memiliki pandangan yang beragam.

Menurut Staniland, bagi sejumlah ilmuwan, ekonomi politik terkesan tak lebih dari sekadar label formal yang diperuntukkan bagi studi-studi yang berkaitan dengan aspek-aspek

public policy (Staniland, 1985:2). Dalam pemahaman demikian, ekonomi politik hanya dimaksudkan untuk klasifikasi belaka, agar menarik perhatian para pembaca, tetapi tidak memiliki metodologi tertentu yang berarti. Yang bermakna dari studi demikian, barangkali, adalah berkaitan dengan minatnya terhadap masalah *the costs and benefits* dari kebijakan-kebijakan tertentu atau struktur-struktur pembuatan keputusan tertentu. Dengan kata lain, studi demikian menaruh perhatian terhadap terhadap *the economics of public policy* tetapi secara esensial juga menaruh perhatian terhadap siapa yang memperoleh keuntungan, siapa yang merasa dirugikan, dan bagaimana itu terjadi, dari *public policy* tersebut.

Sementara itu, ilmuwan-ilmuwan sosial lainnya lebih memfokuskan bagaimana keterkaitan dan interaksi antara ekonomi dan politik. Untuk memahami makna ekonomi politik, Robert Gilpin mencoba membuat penyederhanaan dengan terlebih dahulu melihat inti ekonomi dan politik. Bagi Gilpin, inti dari kegiatan ekonomi itu ada pada pasar, sementara inti dari kegiatan politik pada dasarnya ada pada negara. Ekonomi politik, bagi Gilpin, dengan demikian merupakan studi yang menaruh perhatian pada interaksi antara negara dan pasar. "Tanpa adanya negara dan pasar berarti tidak ada apa yang disebut ekonomi politik," kata Gilpin. Kedua bidang itu merupakan bagian terpenting di dalam studi ekonomi politik. Lebih jauh, ilmuwan yang banyak menaruh perhatian pada studi ekonomi politik internasional ini mengatakan:

Ti adanya keterlibatan negara, mekanisme harga dan kekuatan-kekuatan pasar akan menentukan hasil kegiatan-kegiatan ekonomi; ini akan menjadi mumi dunia para ekonom. Ketiadaan keterlibatan pasar, negara atau yang serupa dengan negara akan mengarahkan sumber-sumber ekonomi; ini akan menjadi mumi dunia para ahli ilmu politik (Gilpin, 1987:8).

Memahami ekonomi politik sebagai suatu keterkaitan antara ekonomi dan politik memang mudah dilakukan. Masalahnya adalah bagaimana mengkaitkan dua bidang yang memiliki karakteristik dan logika yang tidak serupa itu? Robert Gilpin sendiri mengakui betapa kedua bidang itu memiliki logika yang berbeda. Selanjutnya Gilpin mengatakan:

Pada dasarnya, dua logika --negara dan pasar-- terlihat tidak berkesesuaian. Logika pasar adalah menempatkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sangat produktif dan dapat menguntungkan; logika negara adalah merebut dan mengontrol proses pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kapital (Gilpin, 1987:11).

Sementara itu, Bjorn Hettne mengemukakan, cara yang mudah untuk membangun ekonomi politik adalah membentuk bangunan di atas kedua logika itu (Hettne, 1997:3). Dengan demikian ekonomi politik yang terbangun adalah integrasi dari kedua disiplin tersebut. Yang menjadi masalah adalah bagaimana mengintegrasikan kedua disiplin yang memiliki karakteristik berbeda itu? Untuk ini Hettne mengutip pendapat Strange yang mengatakan:

Apa yang saya usulkan di sini adalah suatu cara untuk mensintesakan ilmu politik dan ilmu ekonomi melalui analisis struktural pengaruh-pengaruh negara—atau lebih tepatnya otoritas politik—terhadap pasar dan, sebaliknya, pengaruh kekuatan pasar terhadap negara (Hettne, 1997).

Ilmuwan lain, Allan H. Meltzer, memahaminya lebih sederhana lagi. Baginya, ekonomi politik berarti keterkaitan antara individu dan pembuatan keputusan kolektif (Meltzer, 1991:4). Keterkaitan itu meliputi pemfungsian dari proses pasar dan proses politik dan interaksi di antara keduanya. Pemahaman seperti ini didasarkan pada fakta empiris pada kegiatan ekonomi dan politik yang pernah ada. Kegagalan proses pasar seperti depresi pada 1930-an, kata Meltzer, telah diikuti oleh penekanan-penekanan terhadap pasar, meningkatnya besarnya pajak dan retribusi, dan adanya upaya mencari alternatif mekanisme pasar yang sebelumnya lebih diserahkan kepada individu-individu kepada sebuah lembaga kolektif. Sebaliknya, kegagalan ekonomi sosialis telah memungkinkan terjadinya keinginan untuk melibatkan individu-individu di dalam pembuatan keputusan dan proses pasar.

Ilmuwan lainnya, Janos Kornai, lebih menekan pada pengaruh proses politik pada kegiatan ekonomi. Ekonomi politik secara sederhana dipahami sebagai "bagaimana keputusan-keputusan tentang produksi dan konsumsi, investasi dan tabungan, itu dibuat, apa keputusan-keputusan tentang distribusi pendapatan, bagaimana efisiensi kegiatan ekonomi itu,..." (Kornai, 1992:11).

Sementara itu bagaimana relasi antara ekonomi dan politik terdapat juga berbagai pandangan mengenai kerangka teoritik dan praktek. Menurut Martin Staniland, kalau dirujuk sejak masa Yunani Kuno, berbagai pandangan itu adalah sebagai berikut (Staniland, 1985:6-7):

Pertama, *orthodox liberalism*. Kerangka ini memandang pentingnya individu. Karena itu perilaku individu dan kepentingan-kepentingannya menjadi sesuatu yang fundamental, baik secara analitik maupun normatif. Masyarakat, dalam pandangan kerangka ini, dipandang sebagai kumpulan atau hasil dari berbagai kepentingan-kepentingan individu-individu yang hendak dicapai. Politik atau negara, dengan demikian, tidak lebih sebagai agen melalui mana individu-individu yang ada di dalam masyarakat tersebut berupaya mewujudkan kepentingan-kepentingannya.

Kedua, *"social" critiques of liberalism*. Kerangka yang kedua ini berpandangan sebaliknya dari yang pertama, karena merupakan hasil dari kritik asumsi-asumsi teori pertama. Di dalam pandangan yang kedua ini bukan masyarakat yang dibentuk oleh individu-individu. Justru masyarakatlah yang membentuk perilaku individu-individu. Kerangka yang kedua ini kemudian melahirkan dua kerangka berikutnya.

Ketiga, *"Economism"*. Dalam pandangan *economism*, proses politik merupakan perwujudan dari proses-proses non-politik. Meskipun demikian, pandangan ini berbeda dengan pandangan kaum liberal yang melihat proses politik sebagai hasil dari interaksi antara individu-individu. *Economism* berpandangan bahwa proses politik merupakan hasil dari interaksi antara berbagai kekuatan sosial (*social forces*) yang terdapat di dalam masyarakat. Kekuatan-kekuatan sosial itu, dalam terminologi Marxis misalnya, adalah "kelas-kelas sosial", atau di dalam terminologi teori-teori pluralis merupakan "kelompok-kelompok kepentingan".

Keempat, *"Politicism"*. Kerangka yang keempat ini berpendapat bahwa struktur-struktur politik dapat mengembangkan kepentingan-kepentingannya yang mereka miliki sendiri. Bahkan, struktur-struktur politik itu dapat memasukkan kepentingan-kepentingan ini ke dalam

kepentingan-kepentingan ekonomi tertentu. "Rasionalitas politik" dikatakan dapat mengatasi "rasionalitas ekonomi". Dengan kata lain, "kekuasaan" dilihat sebagai sesuatu yang fundamental di dalam pembentukan sistem ekonomi.

BAB III

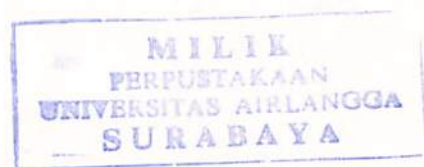
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan dan menjelaskan profile ekonomi politik pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Melalui gambaran demikian diharapkan kita, secara akademik, bisa memperoleh penjelasan yang lebih riil tentang keterkaitan antara ekonomi dan politik, yakni bagaimana saling pengaruh antara kegiatan ekonomi dan kegiatan politik. Di dalam literatur ekonomi politik, seperti dijelaskan di dalam tinjauan kepustakaan, terdapat sejumlah model tentang keterkaitan itu. Penelitian ini diharapkan bisa memperoleh gambaran di dalam pemerintahan Gus Dur ini model pemikiran manakah yang berlaku, ataukah Indonesia memiliki model tersendiri.

2. Manfaat Penelitian

Studi-studi tentang keterkaitan antara ekonomi dan politik selama ini telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan sosial yang menaruh perhatian pada apa yang disebut studi "ekonomi politik". Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya studi-studi tersebut. Apalagi sejauh ini belum ada seorang ahli ilmu sosial pun yang melakukan penelitian ekonomi politik pemerintahan Gus Dur. Penelitian ini diharapkan bisa memaparkan wacana lain tentang ekonomi politik Indonesia. Secara praktis, berdasarkan temuan-temuan yang akan didapatkan, penelitian ini bisa memberikan saran-saran bagi bertambah baik dan lebih tepatnya relasi ekonomi politik di Indonesia agar bisa cepat keluar dari krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan.



BAB IV

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertipekan eksploratif-eksplanatif. Artinya, penelitian ini berupaya mengeksplorasi relasi ekonomi dan politik, atau relasi antara berbagai kebijakan politik (*state*) dengan kegiatan-kegiatan ekonomi (*market*) di Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur. Setelah itu memberikan penjelasan teoritik mengapa relasi seperti itu terjadi.

2. Unit Analisis

Penelitian ini berskala nasional, karena itu arah lebih dikonsentrasikan pada kebijakan-kebijakan dan kegiatan ekonomi yang berskala nasional juga. Ini tidak berarti permasalahan yang ada di tingkat lokal tidak diperhatikan. Apa yang terjadi di tingkat lokal itu lebih dipakai sebagai penopang dari apa yang terjadi di tingkat nasional. Mengingat keterbatasan dana, berbagai fenomena yang menjadi cakupan penelitian itu lebih banyak didekati melalui pengamatan dari jarak jauh, misalnya melalui media massa maupun internet, terhadap berbagai kegiatan politik dan ekonomi yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih banyak memanfaatkan data-data yang terdokumentasi, baik berupa dokumen-dokumen, buku, jurnal, maupun data yang terdapat di dalam media massa dan media elektronik seperti di dalam surat kabar, majalah, dan internet. Tidak dipakai media khusus yang menjadi sorotan. Hal ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa antara media yang satu dengan

media yang lain bisa saling melengkapi, sekaligus sebagai mekanisme kontrol terhadap isi kebenaran yang dimuat di dalamnya.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang dikumpulan akan disajikan ke dalam laporan secara kualitatif. Untuk menunjang penjelasan-penjelasan kualitatif, jika dimungkinkan juga akan disajikan data-data kuantitatif seperti perkembangan kegiatan ekonomi seperti investasi, perdagangan dan kegiatan pasar lainnya pada masa pemerintahan Gus Dur.

BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

1. Bangunan Negara atau Pemerintahan Gus Dur:

1.1. Jatuhnya Pemerintahan Soeharto dan Pemilu 1999

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan presiden pertama yang terpilih melalui proses pemilu yang relatif demokratis sejak Indonesia berada di dalam pemerintahan otoriter sejak 1957. Patokan 1957 acapkali dipakai oleh para ilmuwan politik yang memiliki perhatian terhadap Indonesia karena pada tahun ini pemerintah memberlakukan UU Darurat Perang untuk mengatasi berbagai pemberontakan daerah (Jackson, 1978:3). Sejak dikeluarkannya UU DP ini militer terlibat secara intens di dalam panggung politik di Indonesia. Baik Presiden Soekarno maupun Soeharto menggunakan cara-cara represif untuk mengatasi lawan-lawan politiknya. Memang, di sepanjang pemerintahan Orde Baru selalu diadakan pemilu secara rutin, setiap lima tahun. Namun, enam kali pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintahan Soeharto itu tidak dilakukan secara demokratis. Pemerintah berusaha mempertahankan hegemoni yang dimiliki melalui kemenangan Golkar. Tidaklah mengherankan, di dalam enam kali pemilu itu Golkar rata-rata memperoleh prosentase perolehan suara yang tinggi: 67,45%, suatu kemenangan dengan angka mayoritas mutlak. Melalui kemenangan ini Golkar bisa mengendalikan proses politik di lembaga perwakilan rakyat.

Pemilu 1999 terselenggara setelah pemerintahan Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998 atau dua bulan setelah terpilih kembali pada Sidang Umum MPR Maret 1998. Meskipun Presiden Soeharto terpilih secara aklamasi pada Sidang Umum MPR 1998 itu, penolakan terhadap penguasa Orde Baru selama 32 tahun itu sangatlah besar. Secara sepintas, penolakan itu memang kurang terlihat kalau kita melihat hasil pemilu 1997. Pada pemilu 1997 ini Golkar, partai

penguasa, masih memperoleh suara yang sangat meyakinkan, 84.187.907 atau 74,51% dari total suara. Golkar sendiri, yang ketika itu dipimpin oleh orang kepercayaan Soeharto yakni Harmoko, masih memberi dukungan penuh kepada Soeharto. Masalahnya, mengapa tiba-tiba terdapat gelombang penolakan yang sangat besar terhadap kepemimpinan Soeharto yang didukung oleh Golkar itu?

Betapapun Golkar selalu memperoleh suara di atas 60% di dalam setiap pemilu, tidak berarti Golkar memperoleh dukungan riil dari rakyat. Kemenangan yang diperoleh itu bisa dikatakan sebagai kemenangan semu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kemenangan itu diperoleh melalui proses yang tidak demokratis, termasuk di dalamnya adalah pemilu 1997. Lebih-lebih di dalam pemilu ini terlebih dahulu ditandai oleh penyingkiran terhadap Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI, pada 1996. Setelah memimpin PDI, Megawati memperoleh simpati yang cukup besar, khususnya dari orang-orang yang merindukan kembali pemimpin seperti Soekarno, bapak Megawati. Karena itu, bagi penguasa Orde Baru, Megawati merupakan lawan potensial yang harus disingkirkan. Mereka khawatir, sekiranya Mega tetap memimpin PDI, perolehan suara Golkar akan mengalami penurunan suara yang berarti. Dalam kondisi seperti ini, penguasa akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan hegemoni, termasuk mempertahankan kepemimpinan Soeharto. Tidaklah mengherankan, pemilu 1997, sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, dilihat penuh dengan muslihat dan cara-cara yang tidak fair. Yang beranggapan demikian tidak hanya Megawati dan para pendukungnya, melainkan juga kelompok-kelompok kritis lainnya seperti para mahasiswa dan cendekiawan, dan orang-orang yang terlebih dahulu kritis daripada Mega. Maka hasil pemilu 1997 tidak bisa disebut sebagai pertanda riil kalau rakyat masih memberikan dukungan penuh kepada Soeharto.

Adapun kejatuhan Soeharto sendiri tidak lepas dari konteks ekonomi. Mulai pertengahan 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat dahsyat. Nilai rupiah tiba-tiba jatuh, dari kisaran Rp 2000 per satu US\$ pada Juni 1997 menjadi sekitar Rp 16.000 pada awal

1998. Jatuhnya nilai rupiah ini, secara umum disebabkan oleh fundamental ekonomi Indonesia yang belum kokoh. Secara khusus kejatuhan ini disebabkan oleh masalah hutang luar Indonesia yang cukup besar, baik hutang swasta maupun hutang pemerintah. Apalagi di antara hutang itu berjangka pendek. Selain itu, kejatuhan mata uang rupiah ini juga tidak lepas dari rapuhnya perbankan Indonesia. Di pihak lain, kejatuhan Presiden Soeharto itu juga tidak lepas dari tidakpercayaan rakyat yang semakin memuncak dan tidak solitnya elite politik (Aspinall, 1998).

Terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkannya, kejatuhnya nilai rupiah ini tentu saja membawa implikasi yang sangat besar terhadap kegiatan ekonomi, pasar, yang ada di dalam masyarakat. Biaya produksi di dalam banyak perusahaan, misalnya, melonjak drastis, mengingat komponen yang harus diimpor cukup besar. Konsekuensinya, berbagai barang yang ada di pasaran harganya mengalami lonjakan yang cukup besar. Jatuhnya nilai rupiah juga menjatuhkan dunia perbankan di Indonesia. Sebagian besar bank-bank di Indonesia mengalami kesulitan keuangan. Tidak pelak, permasalahan perbankan ini juga berpengaruh terhadap roda perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Tidak pelak, jatuhnya perekonomian akibat jatuhnya nilai rupiah ini berpengaruh terhadap kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.

Selama ini, salah satu sebab dari bertahan lamanya pemerintahan Orde Baru adalah karena mampu meyakinkan kepada masyarakat kalau pemerintah memberi perhatian yang serius terhadap masalah-masalah ekonomi. Secara statistik, apa yang dikatakan oleh pemerintah ini memang bisa dibuktikan. Misalnya saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang lainnya, berkisar 6-7% per tahun. Jumlah daerah-daerah tertinggal dan orang-orang miskin semakin lama semakin mengecil. Dengan demikian, meskipun pemerintah Orde Baru bercorak otoriter, tidak sampai membuat rakyat secara *massive* melakukan perlawanan terhadapnya. Hanya kelompok-kelompok kritis saja yang berani melakukan perlawanan. Itu pun secara mudah dapat dipatahkan.

Tetapi krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997 itu membuat kredibilitas pemerintahan Orde Baru semakin merosot. Maka, kelompok-kelompok kritis, dengan para mahasiswa sebagai ujung tombaknya, semakin berani melakukan desakan-desakan. Di dalam pandangan mereka, krisis ekonomi dan moneter itu tidak lepas dari kegagalan pemerintah untuk membangun fundamental ekonomi yang kuat dan kokoh. Pemerintah sendiri gagal melakukan pemulihan karena telah kehilangan legitimasi. Dengan demikian berbagai kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi krisis ini tidak memperoleh dukungan yang berarti dari masyarakat. Di dalam suasana seperti itu para mahasiswa dan kelompok-kelompok kritis melakukan tekanan-tekanan. Tidak seperti dalam tahun-tahun sebelumnya, di mana tekanan-tekanan itu lebih banyak berupa opini, pada saat krisis ekonomi dan moneter itu, tekanan-tekanan lebih banyak dilakukan pada gerakan massa. Para mahasiswa di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya, seperti terkomando melakukan demonstrasi. Di kota-kota di luar Jawa seperti Medan, Ujung Pandang, dan sejumlah kota lainnya, para mahasiswa juga melakukan aksi serupa. Gerakan massa itu, khususnya, semakin menguat menjelang SU Maret 1998. Mereka menentang dicalonkannya kembali Jendral Soeharto untuk menjadi presiden. Hanya saja, gerakan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini seperti dipandang sebelah mata oleh penguasa, termasuk para wakil rakyat yang melakukan SU itu. Pada SU itu Soeharto secara aklamasi tetap terpilih sebagai presiden kembali.

Terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden bagaikan minyak yang menyiram bara api. Para mahasiswa itu marah dan lebih aktif melakukan gerakan. Demonstrasi yang dilakukan semakin intens. Mereka seperti menghadapi lawan yang sama: Soeharto. Karena itu, slogan-slogan yang merisikan hujatan dan seruan agar Soeharto mundur menggema di mana-mana. Tekanan ini menjadi semakin kuat setelah para mahasiswa itu memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok lain di dalam masyarakat. Maka, desakan agar Soeharto mundur semakin kuat. Para mahasiswa dan kelompok-kelompok yang menyerukan diadakannya reformasi total

itu lalu menduduki gedung DPR/MPR. Mereka mendesak MPR agar mencabut kembali mandat yang telah diberikan kepada Soeharto. Para anggota MPR sendiri sepertinya tidak memiliki alternatif lain. Para pemimpin MPR itu, dipimpin oleh Harmoko, kemudian menemui Presiden Soeharto agar bersedia mengundurkan diri. Desakan demikian semakin mengemuka karena para penguasa sendiri sudah tidak solid lagi. Militer yang sebelumnya menjadi alat represif penguasa Orde Baru, tidak lagi memiliki loyalitas yang kuat kepada Presiden Soeharto. Demikian juga para elite-elite lainnya seperti 14 menteri yang dipimpin oleh Menko Ekuin Ginanjar Kartasasmita. Dalam situasi seperti itulah Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 mengundurkan diri dan mengalihkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J.Habibie.

Mundurnya Presiden Soeharto itu disambut suka cita. Hanya saja, suka cita ini tidak bertahan lama. Segera setelah itu mereka sadar bahwa mundurnya Soeharto dari pusat kekuasaan tidak otomatis terdapat jalan tol untuk menuju demokrasi. Mereka menyadari bahwa B.J.Habibie merupakan bagian dari kekuasaan lama. Agaknya para aktivis gerakan reformasi tidak begitu memperhitungkan skenario pelimpahan kekuasaan seperti itu. Yang lebih mereka pikirkan adalah "pokoknya Soeharto harus mundur". Mereka tidak begitu memikirkan siapa yang menggantikannya. Karena itu, jatuhnya Soeharto dari pusat kekuasaan tidak menghentikan aksi demonstrasi. Meskipun para pejuang reformasi itu tidak sesolid ketika hendak menurunkan Soeharto, mereka aktif melakukan tekanan-tekanan kepada pemerintahan Habibie. Mereka tidak menginginkan Habibie menjalankan pemerintahan secara penuh. Para aktivis reformasi itu lalu seperti memperoleh kompromi, yakni menganggap pemerintahan Habibie sebagai pemerintahan transisi. Konsekuensinya, mereka mendesak Habibie untuk secepatnya menyelenggarakan pemilu.

Betapapun Habibie merupakan bagian dari pemerintahan lama, pemerintahan yang dipimpinnya relatif lemah. Kaena itu, dalam taraf tertentu terdapat tolak belakang dengan pemerintahan Soeharto. Di dalam pemerintahan Soeharto terdapat pola *strong state, weak*

society, di dalam pemerintahan Habibie terdapat pola *weak state, strong society*. Pola seperti ini bukan semata-mata karena terdapat eskalasi yang cukup tinggi terhadap kekuatan-kekuatan masyarakat untuk berhadapan dengan kekuatan negara. Pemerintahan Habibie tidak memperoleh dukungan dari militer. Menyadari posisinya seperti itu, pemerintahan Habibie menyepakati pandangan masyarakat bahwa pemerintahan yang dipimpinnya merupakan pemerintahan transisi. Untuk itu, Habibie menyetujui diadakannya pemilu yang lebih cepat. Untuk ini berbagai perangkat untuk mempercepat pemilu diadakan. Sidang Istimewa (SI) diadakan, sebagai sumber hukum bagi pelaksanaan pemilu yang dimajukan. Pemerintahan Habibie juga menggodok berbagai perundangan baru, khususnya UU tentang Partai dan UU tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

Sebelum diadakan perombakan-perombakan, masyarakat lebih dulu aktif untuk memprakarsai dan mengantisipasi datangnya era yang lebih demokratis. Hal ini, paling tidak, terlihat dari munculnya partai-partai politik baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, hanya dimungkinkan adanya tiga partai politik (Golkar, PPP, dan PDI). Itu pun dengan catatan bahwa Golkar tidak disebut sebagai partai politik meskipun secara faktual memerankan fungsi-fungsi partai. PPP dan PDI sendiri tidak mampu menjalankan sepenuhnya fungsi partai politik karena terbelenggu oleh suasana otoritarianisme. Jatuhnya Presiden Soeharto oleh masyarakat dijadikan momentum untuk merombak sistem kepartaian seperti ini. Tanpa terlebih dahulu diadakan perombakan UU tentang Kepartaian, mereka ramai-ramai mendirikan partai-partai politik baru. Diperkirakan ada sekitar 200 partai baru muncul setelah kejatuhan pemerintahan Orde Baru ini.

Meskipun demikian, tidak semua partai politik bisa begitu saja mengikuti pemilu. Yang menjadi masalah adalah bagaimana melakukan seleksi terhadap partai-partai ini, siapa atau lembaga apa yang harus menyeleksi dan bagaimana kriterianya? Pemerintahan Habibie agaknya tidak ingin seperti pemerintahan Soeharto. Pemerintah membentuk tim independen, tim 11, yang

bertugas untuk menyeleksi partai-partai ini. Tim inilah yang kemudian memutuskan adanya 48 partai yang bisa mengikuti pemilu 1999.

Pemilu 1999 sendiri menjadi perhatian banyak pihak. Pokok perhatiannya, terutama sekali adalah bagaimana menyelenggarakan pemilu yang *luber dan jurdil (free, fair and genuine election)*. Mengapa perhatiannya banyak diarahkan pada pemilu? Di dalam negara yang demokratis, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Sumber otoritas, dengan demikian, juga berasal dari rakyat. Di negara-negara yang menganut sistem perwakilan, pemilu merupakan proses transformasi kedaulatan, otoritas, dari rakyat ke para wakil yang akan duduk di dalam lembaga perwakilan. Pemilu, dengan demikian, merupakan institusi pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis. Di negara-negara yang menganut sistem pemilihan presiden secara langsung, pemilu juga bermakna proses transformasi kedaulatan rakyat ke pemimpin (presiden). Pemilu, juga dipahami sebagai sebagai transformasi konflik dari masyarakat ke lembaga perwakilan.

Pemilu, dalam konteks seperti itu merupakan instrumen untuk membentuk pemerintahan yang berkeabsahan. Meskipun pemerintah yang terbentuk melalui pemilu itu berkeabsahan, bukan berarti pemerintah bisa berbuat seenaknya. Transformasi kedaulatan, otoritas, bukan berarti kemudian rakyat kehilangan kedaulatan karena sudah dipegang oleh penguasa. Rakyat tetaplah pemilik kedaulatan. Mereka bisa mengontrol para wakil mereka, juga pemerintah. Para wakil atau pemerintah harus mempertanggungjawabkan mandat yang telah diberikan rakyat kepadanya. Hanya saja, tidak semua pemilu berlangsung dan menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Ada juga pemilu yang berlangsung secara tidak demokratis. Secara sederhana ada dua jenis pemilu, yaitu pemilu yang kompetitif dan pemilu yang bertujuan untuk mempertahankan status-quo. Pemilu yang pertama itu berkatagori demokratis karena memungkinkan terdapatnya persaingan untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Sementara itu, pemilu yang kedua tidak bisa disebut demokratis karena pemilu ini dirancang untuk memperhankan status-quo. Di dalam pemilu ini tidak memungkinkan terdapatnya persaingan. Hanya partai penguasa

saja yang diberi hak untuk memperoleh kemenangan di dalam pemilu. Kalaupun yang lain itu diberi hak, prosesnya terdapat ketidakadilan dan pelanggaran-pelanggaran sehingga hanya partai penguasa itu saja yang bisa mungkin memperoleh kemenangan.

Di antara kriteria penting bagi pemilu yang demokratis adalah sebagai berikut. Pertama, *kompetitif*, artinya semua orang dan kelompok, baik yang berkuasa maupun yang berseberangan dengan penguasa, diberi kebebasan untuk mengikutinya. Kedua, *berkala*, artinya pemilu itu berlangsung secara teratur. Para wakil rakyat atau presiden tidak menempati posisinya seumur hidup. Posisi mereka sangat ditentukan oleh pemilu yang berkala itu. Di negara-negara yang menganut sistem presidensial, keteraturan itu sangat jelas, seperti lima tahun atau empat sekali. Di dalam sistem parlementer, keteraturan memang ada, tetapi bisa saja pemilu diadakan sebelum jadwal yang reguler. Misalnya, seharusnya pemilu dilakukan empat tahun sekali, tetapi karena pemerintah yang berkuasa jatuh, bisa saja pelaksanaannya dipercepat. Ketiga, *inklusif*, artinya pemilu itu untuk siapa saja, asal memenuhi syarat, dan berskala luas. Di dalam pemilu yang demokratis tidak ada diskriminasi, hanya diikuti oleh orang atau kelompok tertentu saja.

Pemilu yang benar-benar demokratis memang belum terjadi pada 7 Juni 1999. Sejumlah kecurangan dan kekerasan politik masih mewaminya. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan pemilu-pemilu pada masa pemerintahan Soeharto, pemilu 7 Juni itu relatif berlangsung secara demokratis. Tidaklah mengherankan kalau sejumlah lembaga pemantau pemilu, termasuk pemantau dari luar negeri, kemudian berkesimpulan bahwa pemilu kali ini berlangsung relatif demokratis. Meskipun demikian, pemilu 1999 belum sepenuhnya dikatakan sebagai mekanisme transfer kedaulatan rakyat. Mengapa demikian? Keanggotaan DPR tidak seluruhnya disusun berdasarkan hasil-hasil pemilu. TNI dan Polri yang tidak ikut pemilu memperoleh *privilege*, berupa 38 kursi. Sementara itu 200 anggota MPR juga tidak dipilih melalui pemilu, karena 135 anggota dipilih dari golongan-golongan yang ada di dalam masyarakat, dan 65 anggota lagi dipilih oleh DPRD. Memang, mekanisme pemilihan anggota MPR utusan

golongan dan daerah kali ini jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan anggota MPR serupa pada periode-periode sebelumnya. Tetapi, mekanisme itu akan terasa jauh lebih demokratis apabila keseluruhan anggota DPR dan MPR dipilih langsung oleh rakyat pemilih.

Mengingat mekanisme penyusunan anggota DPR/MPR yang seperti itu, masih ada kelompok-kelompok kritis dari masyarakat yang belum yakin sepenuhnya terhadap lembaga-lembaga perwakilan rakyat itu. Kelompok kritis demikian curiga, kelompok "status-quo" bisa tetap berpengaruh, termasuk mengendalikan kekuasaan. Kecurigaan demikian bertambah ketika memperhatikan isu lain, yakni *money politic*. Kecurigaan seperti itu ternyata tidak sepenuhnya terbukti. Sidang Umum MPR 1999 berlangsung jauh lebih demokratis daripada yang diperkirakan. Hal ini tidak saja terlihat pada proses dan mekanismenya yang lebih terbuka, transparan, bahkan bisa ditonton melalui televisi. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh para wakil rakyat itu merupakan landasan utama bagi keberlangsungan proses reformasi dan demokratisasi. Di antara keputusan terpentingnya adalah berkaitan dengan desakralisasi konstitusi dan lembaga kepresidenan. Selama ini konstitusi dianggap sebagai sesuatu yang suci sehingga *untouchable*. Hal serupa terjadi pada lembaga kepresidenan. Selama ini lembaga ini telah berfungsi sebagai *centre of power* sehingga kekuasaannya cenderung berlebih dan disalahgunakan. Para anggota MPR sepakat melakukan amandemen terhadap konstitusi, termasuk lembaga kepresidenan.

Secara jujur harus diakui, salah satu faktor terjadinya otoritarianisme adalah karena konstitusi kita terlampaui longgar, sehingga terbuka sekali bagi adanya penyalahgunaan kekuasaan. Melalui amandemen, perbaiki struktur politik, berikut perannya-perannya, menuju sistem politik yang lebih demokratis, sangat dimungkinkan. Bagaimanapun juga perbaikan struktur politik ini akan berpengaruh pada perbaikan lembaga-lembaga dan mekanisme-mekanisme lain yang menopang demokratisasi, seperti sistem kepartaian dan pemilu.

Tabel 1: Hasil Pemilu 1999

NO.	NAMA PARTAI	SUARA	KURSI TANPA SA	KURSI DENGAN SA
1	PDIP	35.689.073	153	154
2	Golkar	23.741.749	120	120
3	PPP	11.329.905	58	59
4	PKB	13.336.982	51	51
5	PAN	7.528.956	34	35
6	PBB	2.049.708	13	13
7	PK	1.436.982	7	6
8	PKP	1.065.686	4	6
9	PNU	679.179	5	3
10	PDKP	550.846	5	3
11	PBI	364.291	1	3
12	PDI	345.720	2	2
13	PP	655.052	1	1
14	PDR	427.854	1	1
15	PSII	375.920	1	1
16	PNI FM	385.176	1	1
17	PNI MM	345.629	1	1
18	IPKI	328.654	1	1
19	PKU	300.064	1	1
20	Masyumi	456.718	1	
21	PKD	216.675	1	
22	PNI Supeni	377.137		
23	P Krisna	369.719		
24	P KAMI	289.489		
25	PUI	269.309		
26	PAY	213.979		
27	P Republik	328.564		
28	P MKGR	204.204		
29	PIB	192.712		
30	P SUNI	180.167		
31	PCD	168.087		
32	PSII 1905	152.820		
33	P Masyumi Baru	152.589		
34	PNBI	149.136		
35	PUDI	140.980		
36	PBN	140.980		
37	PKM	104.385		
38	PND	96.984		
39	PADI	85.838		
40	PRD	78.730		
41	PPI	63.934		
42	PID	62.901		
43	P Murba	62.006		
44	P SPSI	61.105		
45	PUMI	49.836		
46	PSP	49.807		
47	PARI	54.790		
48	PILAR	40.517		
	JUMLAH	105.786.661	462	462

Sumber: Biro Humas KPU, *Pemilu Indonesia dalam Angka dan Fakta, Tahun 1955-1999*, Jakarta 2000, hal. 192.

Maka, setelah struktur politik secara berlahan namun pasti diperbaiki, pekerjaan lain yang menunggu adalah bagaimana memperbaiki budaya politik kita. Hal ini didasari oleh fakta bahwa permasalahan demokrasi tidak hanya berkaitan dengan struktur, melainkan juga berkaitan dengan budaya politik. Corak budaya politik kita yang masih paternalistik dan feodal, harus ditransformasi menjadi budaya politik yang partisipatoris dan egaliter. Tanpa transformasi seperti ini wajah demokrasi kita tak lebih dari demokrasi prosedural yang kehilangan jati diri.

1.2. SU MPR dan Terpilihnya Gus Dur Sebagai Presiden

Sebagaimana SU-SU MPR sebelumnya, agenda SU MPR Oktober 1999 tentu saja tidak hanya berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Bahkan, apabila dibandingkan dengan SU-SU MPR sebelumnya, agenda di luar pemilihan presiden dan wakil presiden pada SU MPR 1999 memiliki makna yang lebih serius, karena berkaitan dengan upaya melakukan perubahan-perubahan yang lebih besar terhadap format ekonomi politik Indonesia masa depan. Hal ini, misalnya, terlihat dari adanya agenda untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. UUD ini dianggap terlalu sederhana sehingga memberi ruang bagi penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaan. Karena itu perlu dilakukan perubahan-perubahan yang lebih menyeluruh guna membangun kehidupan politik yang lebih demokratis. Meskipun demikian, pokok perhatian lebih banyak diarahkan pada pemilihan presiden dan wakil presiden.

Berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden itu situasinya lebih menarik kalau melihat hasil pemilu sebagaimana terlihat di dalam tabel 1 di atas. Di dalam tabel itu terlihat bahwa tidak ada satu pun partai politik yang mampu memenangkan pemilu secara mayoritas (50% + 1). Apa makna dari realitas ini adalah bahwa partai pemenang pemilu bisa tidak otomatis bisa memenangkan pemilihan presiden (Marijan, Jawa Pos, 24/5/1999:4). Hal ini tidak lepas dari apa yang terdapat di dalam konstitusi bahwa presiden dan wakil presiden dipilih

oleh MPR. Sedangkan mayoritas anggota MPR sendiri bukan berasal dari partai pemenang pemilu.

Di dalam konteks seperti itu, jauh hari sebelum SU dimulai, terdapat perdebatan di kalangan akademisi maupun politisi tentang posisi pemenang pemilu. Pemilu 1999 telah dimenangkan oleh PDI Perjuangan, pimpinan Megawati, meskipun perolehan suaranya hanya sekitar 34%. Sejumlah akademisi dan politisi (PDIP) beranggapan, demi tegaknya demokrasi, pemenang pemilu harus diberi kesempatan untuk memimpin negeri ini. Pandangan demikian dianggap kurang tepat. Masalahnya, dalam konstitusi yang masih berlaku dikemukakan bahwa presiden itu dipilih oleh MPR. Dalam pandangan kelompok ini, bisa saja pemenang pemilu berkesempatan untuk menggolkan calon presidennya, tetapi harus memperoleh dukungan dari mayoritas anggota MPR. Perdebatan seperti ini semakin menarik karena menjelang persidangan itu telah muncul pengelompokan-pengelompokan, yakni PDI P Cs, Golkar Cs, dan poros tengah.

Pengelompokan-pengelompokan itu telah mengaburkan pengelompokan-pengelompokan pada saat menjelang dan pelaksanaan pemilu. Ketika itu terdapat isu besar, bahwa pemilu 1999 merupakan pertarungan antara kelompok yang hendak mempertahankan "status-quo" dan kelompok "pro-reformasi". Golkar sering dianggap sebagai representasi kelompok pertama, sedangkan partai-partai baru atau partai-partai yang menginginkan perubahan-perubahan dianggap sebagai representasi kelompok kedua.

Pertarungan untuk memperebutkan jabatan presiden telah memperlebar pengelompokan itu, meskipun nuansa pertarungan antara kelompok "pro status-quo" dan "pro-reformasi" masih cukuplah kuat. Oleh para pendukungnya Megawati dipandang sebagai calon presiden dari kelompok "pro-reformasi". Tiga tahun sebelumnya, Megawati telah disingkirkan secara politik oleh penguasa Orde Baru. Sejak saat itu, meskipun tidak dilakukan secara frontal, Megawati termasuk pemimpin yang resisten terhadap kepemimpinan Soeharto. Sementara itu, mengingat kedekatannya dengan Soeharto dan karena pencalonannya dilakukan oleh Golkar, Habibie

acapkali disebut sebagai representasi kelompok "pro-status-quo". Masing-masing kelompok ini memiliki pendukung yang kuat.

Di tengah-tengah pertarungan itu, terdapat gerakan untuk menolak pencalonan Habibie dan Megawati. Gerakan ini dipelopori oleh Amin Rais Cs ini di kemudian hari lebih dikenal sebagai "poros tengah". Kelompok ini pada umumnya terdiri dari partai-partai politik yang berbasis ideologi dan berbasis massa Islam, termasuk di dalamnya adalah PAN pimpinan Amin Rais. Argumen utama yang dibangun oleh kelompok ini adalah untuk mencari jalan tengah bagi polarisasi antara pendukung Habibie dan Mega. Tetapi, secara ideologis, munculnya kelompok ini tidak lepas dari upaya untuk menjegal Megawati karena dia adalah seorang perempuan. Gerakan ini sudah muncul sebelum pemilu. Konferensi Umat Islam Indonesia di Jakarta, misalnya, membuat fatwah bahwa presiden dan wakil presiden Indonesia haruslah laki-laki yang bertaqwa. Hanya saja, poros tengah tidak secara eksplisit menolak Mega karena alasan jender.

Di pihak lain, poros tengah juga menyadari bahwa Habibie bukanlah pilihan yang tepat. Memilih Habibie bisa diartikan mendukung "pro status-quo". Secara obyektif, penolakan terhadap Habibie sendiri meluas. Survey yang dilakukan oleh Majalah Gatra terhadap mahasiswa di sejumlah universitas memperlihatkan bahwa Habibie bukan saja merupakan bagian dari masa lalu. Kredibilitas dan kinerja pemerintahan Habibie juga dipertanyakan. Misalnya, pemerintahan Habibis dianggap tidak becus memberantas KKN. Habibis juga dianggap tidak mampu memperbaiki kondisi ekonomi dan politik (Gatra, 2 Oktober 1999: 36-37). Ketiadaan dukungan terhadap Habibie bukan hanya datang dari para mahasiswa. Di Golkar sendiri terdapat perpecahan. Tidak semua anggota MPR mendukung pencalonan Habibie. DPD Golkar Yogyakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, bahkan terang-terangan menolak pencalonan Habibie. Di tubuh Golkar juga terdapat orang-orang yang mencoba untuk menyandingkan Akbar Tanjung dengan Megawati (Gatra, 9 Oktober 1999:28-29). Keretakan demikian terjadi, terutama sekali setelah terbongkarnya kasus Bank Bali yang diduga melibatkan Habibie.

Di dalam situasi seperti itu poros tengah semakin yakin dengan posisinya. Puncak dari semuanya itu adalah ditolakannya pertanggungjawaban presiden B.J.Habibie. Setelah diadakan voting untuk menentukan diterima tidaknya pertanggungjawaban Habibie, terdapat polarisasi yang sangat kontras. Ada 355 suara anggota MPR yang menolak, 322 menerima, 9 abstain, dan 4 suara rusak. Di antara fraksi-fraksi yang terang-terangan menolak pertanggungjawaban Habibie adalah PDI P dan PKB. Bahkan, tidak semua anggota FPG menerima pertanggungjawaban Habibie itu. Diperkirakan, terdapat sekitar 70 anggota FPG yang menolak pertanggungjawaban Habibie. Kelompok ini selain tidak sepakat terhadap pencalonan Habibie, juga menginginkan adanya duwet Mega-Akbar. Habibie sendiri tahu diri bahwa dirinya tidak memperoleh dukungan penuh. Untuk itu dia mengundurkan diri dari pencalonan.

Situasi seperti itulah yang memberi angin segar bagi poros tengah untuk menggolkan calonnya, Abdurrahman wahid. Mereka berharap, selain memperoleh dukungan dari kaukus partai-partai berbasis ideologi dan berbasis massa Islam, mereka berharap bisa memperoleh dukungan dari para pendukung Habibie, dari F TNI, dan tentu saja dari FPKB, partai yang dibidani oleh Gus Dur. Skenario ini ternyata berjalan mulus. Di dalam pemilihan yang menegangkan, Gus Dur memperoleh dukungan 373 suara, dan Megawati 313 suara. Kemenangan Gus Dur ini tentu saja membuat PDI P dan para pendukungnya kecewa berat. Para pendukung kuat Mega di Bali, Solo, dan di sejumlah daerah lainnya melampiaskan kekecewaan itu melalui pengrusakan terhadap berbagai fasilitas umum. Dalam kondisi seperti inilah terdapat upaya untuk menempatkan Megawati sebagai wakil presiden.

Sidang Umum seperti itu jelas sangat berbeda dengan SU-SU sebelumnya, di mana berbagai keputusan, termasuk keputusan tentang presiden dan wakil presiden, sangat mudah ditebak. SU MPR 1999 telah membuat keputusan-keputusan yang barangkali tidak terbayangkan sebelumnya. Orang jelas tidak membayangkan, bagaimana Amin Rais yang partainya hanya memperoleh 35 kursi di dalam pemilu bisa terpilih sebagai Ketua MPR. Demikian pula dengan

terpilihnya Gus Dur sebagai presiden. Meskipun demikian, keputusan-keputusan itu mensiratkan terdapatnya *sharing and distribution of power* di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada. Ketua MPR dijabat Amin Rais dari PAN. Ketua DPR jatuh ke tangan Akbar Tanjung dari Golkar. Presiden dan wakil presiden masing-masing untuk Gus Dur dan Megawati, dari PKB dan PDI P.

Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tentu saja mengejutkan banyak pihak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa konsentrasi perhatian selama ini lebih diruahkan pada Mega atau Habibie. Gus Dur, sebagaimana calon-calon lain, dipandang tak lebih sebagai calon penggembira. Lebih-lebih kalau melihat fakta lain bahwa PKB, partai yang dibidani oleh Gus Dur, hanya menempati urutan ketiga dalam perolehan suara (*electoral vote*) di dalam pemilu atau urutan keempat di dalam perolehan kursi di DPR. Anggapan demikian ternyata tidak tepat. Gus Dur ternyata serius dan bersedia dipilih menjadi presiden. Beralingnya mayoritas anggota MPR ke Gus Dur lebih didasari oleh pertimbangan bahwa apabila dibandingkan dengan calon-calon lain, tingkat penerimaan Gus Dur lebih besar sedangkan resikonya dilihat paling sedikit.

Memang, terpentalnya Megawati dari kursi kepresidenan, mengesankan proses pemilihan presiden kita berlangsung kurang demokratis. Tetapi setelah menyaksikan fakta bahwa proses pemilihannya berlangsung secara transparan, orang-orang yang berpandangan demikian, termasuk pendukung Mega, menjadi relatif berkurang. Harapan kepada para elite politik baru di dalam mengatasi berbagai permasalahan negara-bangsa, dengan demikian, sangatlah besar. Melalui pemerintahan yang legitimate, karena dipilih melalui proses yang relatif demokratis ini, para elite politik itu diharapkan bisa mengelola negara-bangsa Indonesia secara lebih baik daripada pemerintah sebelumnya.

Meskipun demikian, yang menjadi pertanyaan mampukah Gus Dur membawa negeri ini ke arah yang lebih demokratis. Sebagai orang yang sejak lama memperjuangkan demokrasi banyak orang yang memiliki keyakinan bahwa Gus Dur bisa menjalankan amanah itu. Yang menjadi masalah adalah seberapa jauh percepatan langkah yang akan diambil? Masalah ini

mengemuka karena selama ini Gus Dur dikenal sebagai penganut demokrasi konstitusional. Artinya, perubahan-perubahan yang hendak dilakukan barangkali tidak akan secepat yang diharapkan oleh para aktivis mahasiswa, misalnya. Hal ini, misalnya, terlihat dari pandangan Gus Dur tentang dwi-fungsi TNI. Para mahasiswa menginginkan pencabutan doktrin itu secepat mungkin. Sementara itu Gus Dur yang melihat fakta bahwa kekuatan TNI masih besar cenderung berpandangan bahwa pencabutan itu harus dilakukan secara bertahap. Demikian juga pandangan Gus Dur tentang mantan Presiden Soeharto. Gus Dur berkeinginan untuk mengampuni penguasa Orde baru itu sekiranya bersedia menyerahkan separuh harta bendanya.

Keraguan bahwa demokratisasi yang dikomandani oleh Gus Dur ini akan berlangsung secara cepat juga muncul setelah melihat formasi kabinet yang dibangun. Gus Dur membangun kabinet yang dipimpinnya dengan menggunakan model pemerintahan rekonsiliasi. Kabinet yang disusunnya itu tidak hanya mempertimbangkan aspek profesionalisme, melainkan juga mempertimbangkan kekuatan politik yang berpengaruh dan aspek teritorial. Yang terlihat kemudian, hampir semua kekuatan yang berpengaruh, termasuk militer, tertampung di dalam kabinet Gus Dur.

Model pemerintahan seperti itu memang cukup efektif untuk menciptakan pemerintahan yang legitimate, berikut untuk mengatasi masalah disintegrasi bangsa. Tetapi apabila dilihat dari kebutuhan untuk melakukan percepatan terhadap proses demokratisasi, model pemerintahan seperti itu memiliki kelemahan. Agar terjadi percepatan demokratisasi, pemerintahan yang ada saat ini membutuhkan kekuatan oposisi. Tidak sekadar ada oposisi, agar pemerintahan yang ada itu relatif stabil, yang dibutuhkan adalah oposisi intra parlementer. Masalahnya, karena hampir semua kekuatan riil sudah tertampung di dalam pemerintahan Gus Dur, oposisi intra parlementer itu tidak tumbuh.

Kita memang masih bisa berharap, oposisi itu tetap akan muncul dari kelompok-kelompok kritis, termasuk mahasiswa. Tetapi, mengingat oposisi demikian berada di luar

pemerintahan (oposisi ekstra parlementer), langkah yang dilakukan tidak akan seefektif kalau dilakukan oleh kekuatan riil di dalam parlemen. Kalaupun efektif, oposisi itu dilakukan melalui desakan-desakan yang sangat kuat. Masalahnya, desakan-desakan seperti ini bisa mengganggu stabilitas politik pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pemerintahan Gus Dur ini bisa memberi ruang terhadap oposisi ekstra parlementer ini?

1.3. Kesulitan Konsolidasi

Mengingat pemerintahan yang dipimpinnya merupakan pemerintahan legitimate yang dihasilkan oleh proses pemilu yang relatif demokratis, Gus Dur berupaya membangun pemerintahan yang dipimpinnya itu secara berbeda dengan bangunan pemerintahan sebelumnya. Langkah awal yang ditempuhnya adalah berupaya menampung berbagai kekuatan politik riil yang ada di dalam kabinetnya. Untuk itu, Gus Dur tidak hanya memasukkan orang-orang dekatnya (dari NU atau PKB), dan dari poros tengah yang memberi jalan bagi terpilihnya dirinya sebagai presiden. Gus Dur juga memasukkan orang-orang PDI P dan dari TNI. Orang-orang PDI P dimasukkan karena secara de facto PDI P merupakan pemenang pemilu dan wakil presiden merupakan pucuk pimpinan partai ini. Sedangkan masuknya orang-orang TNI di dalam kabinetnya karena didasari oleh pandangan bahwa secara riil TNI masih memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam masyarakat. Kabinet demikian sering disebut sebagai kabinet pelangi bergaransi (Gatra, 6 November 1999:75). Hal ini disebabkan oleh heterogenitas asal menteri dan karena adanya jaminan tokoh-tokoh kunci seperti Megawati, Akbar Tanjung, dan Amin Rais.

Memang, melalui format seperti itu, Gus Dur memperoleh kritikan yang cukup tajam. Gus Dur, misalnya, dianggap lebih mengedepankan kompromi politik daripada berupaya menempatkan orang-orang untuk menyelesaikan krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan. Kritik itu, misalnya datang dari Faisal Basri, yang mencurigai adanya kecenderungan untuk memilih orang daripada memilih orang yang tepat untuk suatu posisi

(Gatra, 6 November 1999:74). Adapun pos-pos kementerian yang paling banyak dikritik adalah pos kementerian yang berkaitan dengan ekonomi seperti pos kementerian keuangan. Bambang Sudibyo dinilai kurang tepat karena lebih banyak menguasai ekonomi mikro daripada ekonomi makro. Meskipun demikian, Gus Dur beranggapan bahwa yang terpenting adalah bagaimana membangun kebersamaan.

Sementara itu, untuk mengesankan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya lebih mengutamakan pemerintahan yang bersih (*good governance*), di dalam sambutan pelantikan para menteri itu, Gus Dur menyerukan agar sekiranya ada menteri yang memiliki permasalahan hukum bersedia mengundurkan diri. Slogan demikian, agaknya, perlu dikemukakan sebagai sesuatu yang mengesankan adanya perbedaan dengan pemerintah sebelumnya.

Di pihak lain, Gus Dur sendiri selama ini dikenal sebagai intelektual yang memperjuangkan pentingnya penguatan masyarakat (*civil society*). Semangat ini, agaknya, yang membuat dirinya berupaya untuk mendekonstruksi lembaga kepresidenan. Pada masa pemerintahan Orde Baru, dan sebagian dari masa pemerintahan Soekarno, posisi lembaga kepresidenan sangatlah kuat. Lembaga kepresidenan merupakan *central of power*. Gus Dur berupaya mendekonstruksi realitas demikian ke arah corak pandang yang lebih pluralistik. Bahwa lembaga kepresidenan itu bukanlah satu-satunya pusat kekuasaan, melainkan satu dari berbagai pusat kekuasaan yang ada.

Demonstruksi lembaga kepresidenan itu, antara lain, terlihat dari dirombaknya lembaga sekretariat negara. Pada masa pemerintahan Orde Baru, sekretarian negara merupakan dapur utama dari proses politik berikut keputusan-keputusan yang dihasilkan. Presiden Gus Dur merombak sekretariat negara dengan pemberian posisi yang tidak lagi dominan. Pos sekretariat negara sendiri kemudian dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian seperti sekretaris kabinet, sekretarit negara, sekretaris presiden, sekretaris militer presiden, dan sekretaris pengendalian

pemerintahan. Yang terakhir ini belakangan dibiarkan lowong setelah ditinggalkan oleh Bondan Gunawan.

Dekonstruksi lembaga kepresidenan juga diperlihatkan pada upaya Gus Dur untuk lebih dekat dengan rakyat. Untuk itu presiden berupaya melembagakan dialog setelah shalat Jum'at di sejumlah masjid, terutama sekali di masjid Baiturrahman di lingkungan istana negara dan masjid al-Munawaroh di kediaman Gus Dur. Di dalam forum ini masalah-masalah yang diperbincangkan bukannya masalah-masalah keagamaan sebagaimana galipnya selama ini. Di dalam forum ini Gus Dur lebih banyak memperbincangkan masalah-masalah nasional seperti hukum, politik, dan ekonomi. Hanya saja, forum ini pada akhirnya bersifat counter produktif karena melalui forum itu presiden sering melontarkan gagasan-gagasan dan pernyataan-pernyataan yang kroversial.

Dekonstruksi lembaga kepresidenan ini sebenarnya tidak semata-mata disebabkan oleh gaya kepemimpinan Gus Dur yang populis, sehingga menempatkan masyarakat sebagai sesuatu yang penting di dalam proses politik negara-bangsa. Dekonstruksi itu juga tidak lepas dari fakta bahwa secara politik dukungan Gus Dur tidaklah besar. Hal ini berbeda dengan masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Soekarno merupakan pemimpin kharismatik sekaligus proklamator. Sehingga, naiknya ke puncak kekuasaan merupakan konsekuensi dari kekuatan yang dimiliki. Sementara itu, Soeharto naik ke puncak kekuasaan setelah memperoleh dukungan besar dari militer. Kekuatan-kekuatan Islam pada awal-awalnya juga memberi dukungan, karena Soeharto dianggap memiliki jasa untuk menumbangkan komunisme di Indonesia. Gus Dur, seperti disinggung di muka, naik ke puncak kekuasaan tidak dalam posisi seperti itu. Gus Dur terpilih, lebih karena kecelakaan, untuk menghindari konflik antara pendukung Habibie dan Megawati. Di dalam posisi demikian, sulit bagi Gus Dur apabila terus mempertahankan kekuasaan yang berpusat pada lembaga kepresidenan.

Upaya untuk membagi kekuasaan, juga terlihat dari keinginan untuk melanjutkan gagasan otonomi daerah yang sudah dicetuskan pada masa pemerintahan Habibie. Sebagai

konsekuensi dari gerakan demokratisasi, otonomi daerah harus diwujudkan. Bagaimanapun juga, di antara yang membedakan antara otoritarianisme dan demokrasi adalah berkaitan dengan relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di dalam pemerintahan yang otoriter, relasi itu bersifat sentralistik, sementara itu di dalam pemerintahan yang demokratis berlangsung secara desentralistik. Di pihak lain, minimnya otonomi daerah pada masa pemerintahan sebelumnya terbukti telah melahirkan banyak masalah, khususnya yang bersumber pada ketidakadilan relasi. Tuntutan sebagian rakyat Aceh dan Irian Jaya (Papua) untuk merdeka, merupakan akumulasi dari ketidakadilan relasi pusat dan daerah.

Hanya saja, pemerintahan Gus Dur ini masih menghadapi masalah pada bagaimana mengimplentasikan gagasan otonomi daerah itu. Terdapat kesan, pemerintah pusat (departemen-departemen) masih merasa berat untuk melepaskan otoritas yang selama ini dimiliki. Sementara itu, daerah juga menyimpan masalah, khususnya berkaitan dengan kesiapan SDM. Di pihak lain, ada kekhawatiran juga, otonomi ini bisa memunculkan konflik horisontal (antar daerah) dan konflik antara pusat dan daerah.

Betapapun terdapat tekad dari pemerintah untuk membangun kehidupan politik yang lebih demokratis, para elite politik yang ada di dalam pemerintahan Gus Dur ini terlihat tertatih-tatih di dalam melakukan konsolidasi demokrasi. Hal ini terlihat dari konflik antara presiden dengan para politisi di DPR dan MPR. Berbagai pernyataan kontroversi presiden, seharusnya tidak perlu terjadi sekiranya presiden mampu melembagakan proses politik di lembaga kepresidenan. Berbagai pernyataan itu barangkali tidak akan melakirkan kontroversi sekiranya digodog terlebih dahulu di lembaga kepresidenan. Sementara itu, para politisi di DPR dan MPR menanggapi berbagai pernyataan presiden itu secara responsif seolah apa yang dilontarkan oleh presiden itu merupakan suatu keputusan politik. Konsekuensinya, adu argumen antara presiden dengan politisi di DPR dan MPR itu seolah mengindikasikan adanya konflik antar elite politik.

Di lingkungan kabinet pun, Presiden Gus Dur gagal mempertahankan kabinet pelangi. Hal ini diawali oleh pencopotan Menko Kesra Hamza Haz, dilanjutkan dengan pencopotan Jendral Wiranto dari posisi Menko Polkam, berikut Laksamana Sukardi dari kementerian BUMN dan Yusuf Kalla dari kementerian perindustrian dan perdagangan. Kegagalan kabinet pelangi ini, secara potensial, jelas mengurangi kredibilitas berikut legitimasi pemerintahan Gus Dur.

Berkurangnya legitimasi Gus Dur itu sangat nampak pada upaya sejumlah politisi di DPR dan MPR untuk mengubah Sidang Tahunan MPR menjadi Sidang Istimewa. Argumen pokok yang dikemukakan oleh para politisi ini adalah karena Presiden Gus Dur dianggap sering mengemukakan pernyataan kontroversial dan mengeluarkan kebijakan yang tidak konsisten. Di samping itu, mereka juga menilai Gus Dur telah gagal melakukan amanat reformasi, seperti cepat melakukan pemulihan ekonomi dan pemberantasan KKN.

Hanya saja, mengingat para penentang Gus Dur itu masih belum begitu kuat, upaya untuk menggusurnya pada ST mengalami kegagalan. Meskipun demikian, di dalam ST ini Gus Dur memperoleh kritikan yang sangat tajam. Sebagian besar fraksi-fraksi di MPR memberi rapor merah kepada pemerintahan Gus Dur. Meskipun demikian, MPR masih memberi kesempatan kepada Gus Dur untuk menjalankan pemerintahan. Hanya saja, MPR memaksa kepada Gus Dur agar memberi kewenangan yang lebih besar kepada Megawati untuk terlibat di dalam pengaturan pemerintahan. Pada awalnya sejumlah fraksi di MPR menginginkan pelimpahan kewenangan itu diwujudkan di dalam Tap MPR. Tetapi pada akhirnya disepakati bahwa pelimpahan kewenangan itu cukup di dalam kepres saja. Hanya saja, wujud kepres No.121/2000 tidak berupa pelimpahan kewenangan melainkan hanya penugasan kepada wakil presiden untuk melaksanakan tugas teknik pemerintahan sehari-hari. Tugas itu pada akhirnya memang dilaksanakan oleh Megawati, seperti memimpin sidang kabinet. Hanya saja, di dalam prakteknya Presiden Gus Dur masih memiliki peran yang tetap besar di dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Bukti bahwa Presiden Gus Dur masih dominan di dalam pemerintahan terlihat pada penyusunan kabinet baru hasil *reshuffel*. Di dalam penyusunan kabinet baru ini Megawati tidak banyak dilibatkan (Gatra, 26 Agustus 2000). Ini terlihat dari tidak masuknya orang-orang kepercayaan Megawati di dalam susunan kabinet baru itu. Tidaklah mengherankan kalau ada yang menyebut para menteri di dalam kabinet baru itu sebagai "orang-orang presiden". Realitas demikian tentu saja ironis. Bagaimana seorang wakil presiden yang menjalankan pemerintahan secara teknis sehari-hari tetapi harus memimpin para menteri yang bukan orang-orang kepercayaannya. Memang, di satu sisi Gus Dur memiliki peluang lebih besar untuk memiliki para menteri yang loyal kepada dirinya. Tetapi, di sisi lain, masalah ini bisa memancing ketegangan baru. Paling tidak, PDI P yang kecewa terhadap Gus Dur yang telah memecat menterinya, Laksamana Sukardi, dengan tuduhan berbau KKN, bertambah kecewa dengan kabinet baru itu.

2. Bangunan Ekonomi Pemerintahan Gus Dur:

2.1. Warisan Pemerintahan Orde Baru

Sampai menjelang krisis ekonomi dan moneter pada pertengahan 1997, Indonesia merupakan bagian dari kisah sukses bangunan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tiga dekade pemerintahan Orde Baru di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Tidaklah mengherankan kalau Indonesia kemudian sering disebut sebagai salah satu dari keajaiban ekonomi dunia. Betapa tidak, pada pertengahan 1960an, oleh Benjamin Higgins Indonesia disebut sebagai the "*chronic economic dropout*". Saat itu, Indonesia tidak saja mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi. Pendapatan perkapita Indonesia, ketika itu, bahkan tidak jauh berbeda dengan ketika masih dijajah oleh Belanda pada 1920-an (Higgins, 1968).

Hal Hill termasuk ekonom yang memberi apresiasi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di sepanjang awal pemerintahan Orde Baru sampai tahun-tahun menjelang krisis.

Menurut analisisnya, dari berbagai indikator perkembangan ekonomi, semuanya mengindikasikan angka positif. Di awal-awal, pemerintah Orde Baru dipandang telah mampu melakukan *recovery* perekonomian secara meyakinkan. Hal ini ditunjukkan oleh menurun tajamnya laju inflasi dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Tidaklah mengherankan kalau pada akhir 1980an Indonesia telah diklasifikasikan sebagai salah satu dari "*newly industrialized economies*" yang berkembang di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara (Hill, 1996:3). Tidak hanya pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktur ekonomi dari sektor pertanian ke industri saja yang nampak. Tingkat kesejahteraan rakyat juga nampak. Paling tidak hal ini terlihat dari angka kemiskinan. Pada 1965, angka kemiskinan itu masih mencakup lebih dari 60% data total penduduk. Menjelang terjadinya krisis, angka itu telah berkurang menuju sekitar 10% (Hill, 1998:94).

Meskipun demikian, jauh hari sebelum krisis ekonomi dan moneter muncul, sudah ada kritik terhadap berbagai kebijakan ekonomi makro pemerintah. Para pengkritik yang menggunakan perspektif "ketergantungan", misalnya, melihat pembangunan ekonomi Indonesia terlampaui tergantung kepada negara-negara maju (Arief dan Sasono, 1984). Perspektif ini memang tidak yakin dengan model pembangunan yang dikembangkan oleh negara-negara Barat yang menggunakan perspektif "modernisasi" (interdependensi) yang optimis bahwa negara-negara yang terbelakang atau sedang berkembang kelak akan mampu mengejar negara-negara maju sekiranya mampu mengadopsi model pembangunan yang pemeh mereka anut. Di dalam perspektif ketergantungan, negara-negara terbelakang sulit mengejar keteringgalannya dari negara-negara maju karena memiliki ketergantungan-ketergantungan, seperti ketergantungan modal dan finansial, ketergantungan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ketergantungan politik.

Kritik seperti ini acapkali diabaikan oleh para pembuat kebijakan Orde Baru. Mereka berpandangan bahwa Indonesia bagaimanapun juga membutuhkan modal dan teknologi dari luar

negeri. Keberadaan investor, khususnya investor asing, dan negara-negara atau lembaga-lembaga keuangan internasional yang bisa memberi pinjaman, dengan demikian, sangat penting sekali. Modal asing atau hutang luar negeri ini diharapkan bisa merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Modal asing dan hutang luar negeri ini diasumsikan bisa menjadi daya dorong (*big factor*) bagi bergeraknya kegiatan produksi dan distribusi (pasar). Ujung-ujungnya, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.

Berangkat dari asumsi seperti itu, pemerintah Orde Baru berupaya serius mengundang para investor asing ke Indonesia. Beranekaragam proyek telah dikerjakan oleh para investor ini. Pemerintah juga berupaya memperoleh pinjaman, baik dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, ADB, maupun dari negara-negara donor. Hutang ini tidak hanya dilakukan oleh negara, melainkan juga oleh pelaku-pelaku ekonomi di luar negara (swasta). Yang menjadi masalah adalah, mengapa tiba-tiba Indonesia terjebak di dalam krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan? Seperti diketahui, krisis ini bermula di Thailand, ketika terdapat depresiasi nilai mata uang bath secara besar-besaran. Depresiasi itu memiliki efek domino, merembet ke negara-negara lain seperti Malaysia, Korea Selatan, Philipina, dan Indonesia. Pengaruh krisis di Thailand terhadap Indonesia ini cukup mengherankan Hal Hill. Dalam pandangan dia, apa yang terjadi di Indonesia memiliki perbedaan pada gejala yang mendahuluinya. Baik di Korea Selatan maupun di Thailand sudah ada indikator-indikator yang menjadi peringatan. Di Thailand, misalnya, beberapa bulan sebelum krisis telah terdapat pelarian modal ke luar negeri. Pasar uang juga mengalami kemerosotan. Sementara itu, kondisi finansial di Indonesia pada kurun waktu yang sama cukup baik. Bursa efek, misalnya, mengalami *booming*, sementara itu mengingat pemerintah memiliki otoritas di dalam mengatur valas, kondisi mata uang rupiah pada dasarnya masih relatif kuat. Lebih jauh lagi, kondisi makro ekonomi juga cukup bagus. Melalui sistim anggaran berimbang, defisit anggaran relatif kecil. Inflasi juga masih di bawah dua digid (Hill, 1998:94-95). Yang menjadi masalah, mengapa Indonesia juga

tenggelam di dalam krisis, bahkan lebih hebat dan lebih lama apabila dibandingkan dengan Thailand? Hal Hill mengakui, tidak ada satu pun penjelasan tunggal untuk dapat menjelaskan realitas demikian (Hill,1998:95-97). Yang jelas, krisis berkepanjangan ini merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor seperti perkembangan finansial di tingkat internasional dan kondisi ekonomi dan politik di dalam negeri. Yang pasti krisis ini bermula dari menurunnya nilai mata uang rupiah, menyusul fenomena yang sama di Thailand. Depresiasi ini diiringi oleh adanya pelarian modal ke luar negeri (*capital flight*). Yang terakhir ini dipicu oleh, paling tidak, tiga faktor.

Pertama, sebelum krisis pemerintah memberlakukan "*quasi-fixed exchange rate*", termasuk di dalamnya adalah kebijakan mata uang ketat. Untuk meminimalisasi memanasnya ekonomi, pemerintah memilih untuk menaikkan suku bunga. Besarnya suku bunga di Indonesia berkisar tiga kali lebih tinggi dari bunga bank diluar negeri. Dalam situasi seperti ini banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan pemimjaman uang dari luar. Maka, ketika nilai rupiah jatuh dan hutang itu harus dibayar dengan dollar, kondisi pasar uang menjadi panik. Di dalam situasi seperti ini bank Indonesia tiba-tiba mengubah kebijakan *exchange rate* menjadi mengambang (*floated*). Sayangnya, kebijakan demikian tidak mampu menyelesaikan masalah. Yang terjadi kemudian, kemerosotan nilai rupiah menjadi-jadi, yaitu dari Rp 2.500 per 1 US\$ pada Juni 1997 menjadi Rp 17.000 pada pertengahan Januari 1998. *Kedua*, berkaitan dengan kondisi hutang luar negeri. Perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak sedikit yang melakukan spekulasi dengan melakukan transaksi hutang berjangka pendek (*short-term*). Di dalam perkiraan Bank Indonesia, pada Januari 1998 hutang jangka pendek itu berkisar US\$ 30-40 milyar. Konsekuensinya, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya membutuhkan dollar yang lebih banyak, yang berakibat menurunnya nilai rupiah. Kebutuhan untuk melunasi hutang yang sudah jatuh tempo itu juga bisa berarti adanya *capital flight*. Tidak hanya hutang yang berjangka pendek, hutang jangka yang berjangka panjang pun mengandung masalah, karena Indonesia harus membayar cicilan yang jumlahnya sangat besar, sebagaimana terlihat di dalam tabel 2.

Tabel 2 : Kondisi Hutang Luar Negeri Indonesia

Tahun	Jumlah Hutang	Yang Dicairkan	Bunga Cicilan	Tranfer Bersih
(Rp.Juta)	(A)	(B)	(C)	(B) - (C)
1966		1.708	463	1.245
1967		24.689	5.327	19.362
1968		35.537	25.540	9.997
1969		103.920	45.715	58.205
1970		120.531	56.166	64.365
1971		131.102	46.600	84.502
1972		157.800	53.400	104.400
1973		203.900	56.500	147.400
1974		232.050	73.700	158.350
1975		491.640	78.500	413.140
1976		783.800	189.500	594.300
1977		773.400	228.300	545.100
1978		1.035.500	534.500	501.000
1979		1.381.100	684.100	697.000
1980		1.493.900	784.800	709.100
1981		1.709.000	931.100	777.900
1982		1.940.000	1.225.500	714.500
1983		3.882.000	2.103.000	1.779.000
1984		3.478.000	2.103.000	1.375.000
1985		3.572.000	3.323.000	249.000
1986		5.751.000	5.058.000	693.000
1987		6.158.000	8.204.000	(2.046.000)
1988		9.991.000	10.904.000	(913.000)
1989		9.429.000	11.939.000	(2.510.000)
1990		9.905.000	13.395.000	(3.490.000)
(US\$ ribu)				
1991	72.984.000	11.758.429	11.491.786	266.643
1992	83.885.000	13.532.913	12.356.642	1.176.271
1993	89.521.000	8.084.176	14.088.759	(6.004.583)
1994	101.488.000	12.546.541	14.267.079	(1.720.538)
1995	107.800.000	13.628.469	16.415.932	(2.787.463)
1996	114.445.000	20.980.971	21.459.181	(478.210)
1997	137.424.000	8.090.965	23.275.562	(15.184.597)
1998	144.021.000	6.227.120	18.836.158	(12.609.038)
(Proyeksi, US\$ ribu)				
1999	107.270.478	3.799.933	18.076.192	(14.276.259)
2000	95.356.770	2.352.287	15.444.801	(13.092.514)
2001	87.325.986	1.430.318	10.931.738	(9.501.420)
2002	81.388.698	813.850	8.456.654	(7.642.804)
2003	76.100.623	493.170	7.506.244	(6.823.222)
2004	71.087.853	102.545	6.925.767	(6.187.210)
2005	66.398.664	50.396	6.237.606	(6.187.210)
2006	61.552.619	10.925	4.603.381	(4.592.456)

Sumber: Roem Topatimasang (Penyunting), *Hutang Itu Hutang*, Insist, Yogyakarta 1999, hal. 57.

Di samping bermasalah terhadap nilai tukar rupiah, hutang luar negeri selama ini memang disalahgunakan. Secara teoritis terdapat dua pola hutang luar negeri yang dilakukan oleh negara-negara sedang berkembang (Basalim, 2000:40-51). Pola pertama adalah adanya permintaan yang benar-benar dilandasi oleh kebutuhan mengenai proyek-proyek yang jelas. Karena dilandasi oleh perhitungan yang matang, biasanya tidak sampai menimbulkan permasalahan di dalam mengembalikannya (*repayment capacity*). Pola kedua adalah hutang luar negeri yang didasarkan oleh faktor random. Faktor ini sangat terkait dengan perilaku elite politiknya yang korup. Hutang luar negeri tidak sepenuhnya terkait dengan proses produksi secara riil, melainkan berkaitan dengan kepentingan elite sendiri. Hutang luar negeri Indonesia menurut Basalim dkk, lebih cenderung ke pola kedua.

Ketiga, adanya sistem finansial domestik yang miskin manajemen dan pengawasan. Sejak munculnya liberalisasi di bidang finansial pada akhir 1988, tidak ada pengawasan yang cukup efektif dari pemerintah terhadap masalah ini. Puncak dari masalah ini adalah krisis moneter yang parah itu. Bahkan, ketika pada 1 November 1997 pemerintah menutup 16 bank, bukannya menyelesaikan masalah. Keputusan ini justru memunculkan kepanikan sehingga bertambah memperparah dunia perbankan. Sarbini Sumawinata menyoroti masalah itu lebih secara kritis dan struktural sifatnya. Di dalam pandangan guru besar ekonomi yang pernah dipenjarakan oleh penguasa Orde Baru ini, krisis ekonomi dan moneter di Indonesia tidak lepas dari karakteristik kapitalisme yang ada di Indonesia. Lebih jauh Sarbini mengatakan:

Kapitalisme yang ada di Indonesia, adalah kapitalisme yang paling buruk, jahat dan paling tidak bertumbuh. Kapitalisme di Indonesia terjadi pada masa diktator Soeharto. Di mana secara langsung sudah terjadi kolusi antara penguasa dan pemodal. Dengan adanya kolusi ini maka terjadilah kapitalisme yang paling jahat oleh karena dengan adanya kolusi-kolusi ini maka terjadilah hampir secara otomatis monopoli-monopoli yang sangat memperkuat dan mempercepat pertumbuhan dari pemodal-pemodal di Indonesia (Sumawinata, 2000:12).

Ekonomi Indonesia, oleh Sarbini, disebut sebagai *bubble economy* (ekonomi balon-balon sabun). Para pelaku ekonomi berupaya untuk memperkaya diri secepat-cepatnya. Untuk itu,

mereka lebih tertatik pada proyek-proyek yang cepat mendatangkan keuntungan dan berjumlah besar seperti proyek-proyek real estate dan property, serta operasi bursa efek, bursa saham dan bursa valuta asing. Krisis ekonomi dan moneter di Indonesia terjadi manakala "balon-balon sabun" itu meletus satu persatu.

Pemerintah Orde Baru sendiri berupaya mengatasi masalah itu. Tetapi, mengingat legitimasi pemerintahan Soeharto semakin mesosot, berbagai kebijakan yang dikeluarkan tidak memperoleh dukungan kuat, baik dari rakyat maupun pelaku bisnis sendiri. Bahkan, di dalam menghadapi krisis itu pemerintahan Soeharto terlihat panik. Ini terlihat dari menduanya kebijakan moneter yang akan ditempuh. Di satu sisi pemerintah berupaya mengikuti saran dari IMF untuk memberlakukan sistem nilai tukar mengambang bebas (*free float exchange rate*), di sisi lain, Presiden Soeharto juga tertarik untuk memberlakukan nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) di dalam *Currency Board System* (CBS). Yang terakhir ini dimaksudkan untuk mematikan langkah para spekulasi (Basalim dkk, 2000:75). Konsekuensi dari ketidakpastian kebijakan ekonomi makro ini ternyata bertambah parah. Nilai mata uang rupiah bukannya menguat, melainkan melemah.

Memang, pada akhirnya Indonesia lebih cenderung melakukan komitmen dengan IMF. Lembaga keuangan internasional ini memiliki komitmen untuk memberi pinjaman sebesar 43 milyar US\$. Hanya saja, uang sebesar ini tidak diberikan sekaligus dan tanpa syarat. Pemberian hutang itu dikaitkan dengan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan sebagaimana terdapat di dalam *letter of intents* (LoI). Meskipun demikian, berbagai resep yang ditawarkan oleh IMF ini tidak mujarab di dalam prakteknya. Bahkan, acapkali terdapat ketegangan-ketegangan hubungan antara Indonesia dan IMF. Lembaga keuangan internasional ini tidak hanya memperhitungkan variabel ekonomi, melainkan juga variabel non-ekonomi, terutama politik, di dalam memutuskan kebijakan-kebijakannya terhadap Indonesia.

2.2. Ekonomi Pemerintahan Gus Dur: Sulit Menembus Jalan Buntu

Meskipun secara politik tidak memperoleh dukungan yang kuat, pemerintahan Habibie sebenarnya telah berupaya mengatasi krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan itu. Pada masa ini pemerintah berupaya melakukan stabilisasi ekonomi. Hasilnya sebenarnya lumayan. Ini, misalnya, terlihat dari sejumlah indikator seperti membaiknya nilai rupiah, jauh berkurangnya minus pertumbuhan, berkurangnya laju inflasi, dan mulai bertambahnya nilai ekspor non-migas. Nilai mata uang rupiah yang pada awal pemerintahan Habibie berada di atas Rp 10.000 per satu dollar AS, bisa beranjak ke arah Rp 6.700 pada Juni 1999. Pada bulan yang sama, laju inflasi yang pada masa pemerintahan sebelumnya sudah mencapai 77,6%, berubah menjadi minus 0,34%. Pada masa pemerintahan Habibie itu pula suku bunga bank menurun.

Hanya saja, mengingat pemerintahan Habibie dianggap tidak legitimate, perbaikan-perbaikan itu acapkali dianggap tidak berarti. Pada masa pemerintahan Gus Dur, apa yang telah dicapai oleh pemerintahan Habibie itu diharapkan bisa berlanjut secara baik. Mengingat proses penyelesaian krisis ekonomi dan moneter di Indonesia berkait dengan faktor-faktor non-ekonomi, pemerintahan Gus Dur berupaya menyusun strategi pembangunan yang lebih menyeluruh. Langkah itu, paling tidak tergambar pada lima pokok kebijakan strategis, yaitu: 1) Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan kesatuan dan persatuan. 2) Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih. 3) Mempercepat pemulihan ekonomi serta membangun landasan pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan. 4) Meningkatkan pembangunan kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya; serta 5) Meningkatkan pembangunan daerah.

Merasa bahwa pemerintahan yang dipimpinnya memiliki legitimasi kuat dari rakyat, Presiden Gus Dur memiliki keyakinan bahwa tanpa dukungan internasional, apa yang dicanangkan itu tidak akan memiliki makna yang berarti. Untuk itu, Presiden Gus Dur langsung melakukan lawatan ke luar negeri, baik ke negara-negara tetangga di Asia maupun di negara-

negara lain di kawasan Timur Tengah, Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, dan Afrika. Tujuannya, di samping untuk memperoleh dukungan bagi pemerintahannya, untuk memotong mata rantai bagi gerakan separatis seperti di Aceh dan Irian Jaya, juga untuk memperoleh dukungan di dalam menyelesaikan krisis ekonomi dan moneter.

Negara-negara yang dikunjungi oleh Gus Dur itu pada umumnya memberi dukungan positif kepada pemerintahan Gus Dur. Mereka, misalnya, mengakui keutuhan negara kesatuan Indonesia. Di bidang kerjasama ekonomi, negara-negara lain itu juga menunjukkan minatnya. Paling tidak hal ini tercermin pada pertemuan presiden dengan para pengusaha di Singapura pada awal November 1999. Di dalam pertemuan yang memperoleh dukungan dari Perdana Menteri Goh Chok Tong dan Menteri Senior Lee Kuen Yew, dihadiri oleh 400 pengusaha Singapura. Konon, yang berminat mengikuti pertemuan lebih dari itu. Hanya saja, karena tempatnya terbatas, hanya dibatasi 400 pengusaha saja, betapapun mereka harus membayar tiket masuk sebesar S\$ 400 (Swa, 26 Januari 2000). Para pengusaha itu pada umumnya tertarik untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Pemerintah Singapura sendiri memiliki komitmen untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, untuk membantu tim ekonomi di dalam kabinet yang dikritik memiliki kelemahan, Presiden Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang beranggotakan orang-orang yang memiliki keahlian di dalam ekonomi, dan Dewan Pemulihan Usaha Nasional (DPUN) yang terdiri dari para pengusaha. Kedua dewan ini diharapkan bisa memberi masukan-masukan kepada pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Kedua lembaga ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada presiden tentang berbagai strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah di bidang ekonomi. Dua tim ini diharapkan bisa memperkuat tim ekonomi yang terdapat di dalam kabinet. Sementara itu, pemerintahan Gus Dur ini juga melanjutkan lembaga-lembaga teknis yang secara khusus memiliki fungsi di dalam

pemulihan ekonomi seperti BPPN, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan penyelesaian hutang dan restrukturisasi ekonomi.

Hanya saja, langkah-langkah strategis yang dicanangkan oleh pemerintahan Gus Dur itu kurang berjalan secara baik. Bangunan sistem politik yang demokratis, misalnya, baru sebatas adanya *euforia* kebebasan, baik di tingkat elite maupun di tingkat *grassroots*. Proses penyelesaian konflik, yang muncul akibat berbagai kebebasan itu kurang menampak. Konsekuensinya, kestabilan politik di Indonesia masih belum terjamin. Kondisi demikian jelas tidak kondusif bagi adanya percepatan pemulihan ekonomi. Demikian juga halnya dengan penegakan hukum. Berbagai kasus KKN tidak dituntaskan secara baik. Kasus mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, misalnya, selama ini masih mengambang. Konsekuensinya, performance ekonomi di dalam pemerintahan Gus Dur ini masih mengecewakan. Memang dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, *performance* itu relatif bagus. Tetapi apabila dilihat dari indikator-indikator lainnya, kurang menggembirakan, seperti masih melemahnya nilai rupiah dan indeks harga saham gabungan, dan inflasi yang sudah mendekati dua digit.

Barangkali ungkapan majalah Tempo bisa menggambarkan betapa rumitnya kerja pemerintahan Gus Dur ketika mengevaluasi seratus hari pemerintahan ini: "100 Hari Pemerintahan Gus Dur: Banyak Berjanda Kisruh Bekerja." (Tempo, 30 Januari 2000). Gus Dur selama ini memang dikenal sebagai orang yang memiliki *sense of humor* yang tinggi. Karena itu, di dalam menghadapi peliknya ekonomi, juga dilakukan melalui gaya canda pula. Ungkapan "Gitu saja kok repot" dari presiden paling tidak menggambarkan situasi ini. Gus Dur sendiri, di akhir 2000 mengakui bahwa kinerja pemerintahannya selama ini belum bagus. Karena itu dia bertekad untuk memperbaikinya pada 2001 dan tahun-tahun mendatang. Masalahnya, mampukah energi pemerintahan yang sedikit tetapi dihabiskan untuk menyelesaikan banyak masalah itu bisa efektif untuk menyelesaikan krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan ini? Dari **performanca pemerintahan Gus Dur saat ini kita bisa belum memastikan jawabannya.**

3. Relasi Ekonomi dan Politik

Apabila mencermati krisis ekonomi dan moneter di Indonesia dari perspektif ekonomi semata, rasanya tidak masuk akal kalau negeri ini harus mengalami krisis secara terus menerus. Negara-negara lain yang sebelumnya sama-sama mengalami krisis berat seperti Thailand dan Korea Selatan sudah cepat mengalami *recovery* dan pertumbuhan. Sebagaimana terlihat di dalam lampiran, Korea Selatan yang pada 1998 mengalami minis pertumbuhan sebesar 7%, setelah itu justru mengalami pertumbuhan yang menajubkan. Pada kuartal pertama 1999, pertumbuhannya memang hanya 0%. Tetapi pada kuartal kedua, ketiga dan keempat rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 11,7%. Pada 2000 tingkat pertumbuhan ekonominya juga tidak jauh berbeda. Pada kuartal pertama dan kedua pertumbuhan rata-ratanya sebesar 11,2%.

Thailand juga mengalami kecenderungan yang serupa dengan Korea Selatan. Pada 1997 dan 1998 pertumbuhan ekonomi di Thailand masih minus, masing-masing 0,4% dan 8%. Pada kuartal pertama tahun berikutnya, pertumbuhannya sudah 0%, dan pada kuartal kedua, ketiga, dan keempat rata-rata Thailand mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9%. Pada 2000 Thailand juga mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan, meskipun tidak sebesar pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Indonesia sebenarnya juga telah mengalami pemulihan ekonomi. Tetapi tidak secepat kedua negara itu. Pada 1998 angka pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 13%. Pada kuartal pertama tahun berikutnya sudah mencapai 0%, dan baru pada kuartal-kuartal selanjutnya rata-rata mengalami pertumbuhan 3,3%.

Apabila dilihat dari nilai ekspor sebenarnya krisis ekonomi dan moneter di Indonesia tidak terlalu berpengaruh. Paling tidak hal ini terlihat dari kecenderungan ekspor non-migas. Pada 1997 nilai ekspor non-migas Indonesia sebesar US\$ 43,132,742,000, 1998 sebesar US\$ 41,858,672,000, dan 1999 sebesar US\$ 43,295,849,000. Pada 2000, nilai ekspor non-migas itu mengalami kenaikan sebesar 30%. Tetapi, kenaikan ini tidak serta merta mengindikasikan bahwa krisis ekonomi di Indonesia serta merta telah selesai. Demikian juga indikator adanya

pertumbuhan ekonomi di atas. Krisis itu masih terasa apabila kita melihat indikator lainnya, seperti masih terpuruknya nilai rupiah dan harga saham gabungan, masih menurunnya nilai investasi, baik dari PMA maupun PMDN.

Secara teoritis krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan ini bisa lebih cepat terselesaikan dengan adanya pemerintahan baru yang legitimate karena terbentuk melalui proses pemilu yang relatif demokratis. Pandangan demikian berkaitan dengan argumen sebelumnya bahwa salah satu pokok penting berkepanjangan krisis ekonomi dan moneter di Indonesia adalah karena faktor-faktor non-ekonomi. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa krisis ekonomi dan moneter di Indonesia bersamaan atau diikuti oleh krisis politik. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Thailand dan Korea Selatan. Jauh hari sebelum krisis ekonomi dan moneter di kedua negara itu telah terlebih dahulu terdapat reformasi politik, yakni adanya transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang lebih demokratis atau transisi dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil. Dengan demikian, fokus perhatian di dua negara itu lebih tercurah pada bagaimana menangani krisis ekonomi dan moneter.

Permasalahannya, mengapa pemerintah baru yang legitimate itu belum mampu memulihkan ekonomi secara meyakinkan? Pemerintah itu barangkali memiliki *excuse* bahwa hal ini terjadi karena permasalahan yang diwariskan oleh pemerintah Orde Baru sangatlah besar. Permasalahan itu tidak hanya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dasar, melainkan juga berkaitan dengan sesuatu yang sudah mendarah daging di lingkungan pemerintahan. KKN di lingkungan birokrasi dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, misalnya, acapkali dianggap sudah menjadi budaya. Realitas demikian menjadikan pemerintah mengalami kesulitan untuk menciptakan *good and clean governance*. Bahkan, di dalam pemerintahan baru ini, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif, juga terdapat tanda-tanda adanya KKN baru.

Kecurigaan adanya KKN baru itu, paling tidak, terlihat pada proses penyelesaian hukum pada sejumlah konglomerat. Pada 21 Oktober 2000, Jaksa Agung Marzuki Darusman

mengumumkan adanya penundaan proses hukum terhadap 21 pengutang terbesar di BPPN (Tempo, 5 November 2000: 28). Pengumuman ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan presiden di Seul dia minggu sebelumnya bahwa pemerintah akan menunda proses hukum tiga konglomerat kelas kakap: Marimuti Sinivasan (Group Texmaco), Sjamsul Nursalim (Gajah Tunggal), dan Prajogo Pangestu (Barito/Candra Asri). Padahal hutang dari tiga konglomerat ini terbilang besar. Marimutu, bermasalah dengan kredit macet lebih dari 19 triliun. Sjamsul Nursalim bermasalah dengan BLBI di BDNI lebih dari 27 triliun, dan Prajogo bermasalah dengan kredit macet sekitar 10 triliun.

Proses penyelesaian hutang para konglomerat di BPPN sendiri masih bermasalah. Pada masa pemerintahan Habibie masalah ini diselesaikan melalui *Master of Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA). Proses penyelesaian ini dianggap merugikan pemerintah. Hutang para konglomerat itu bisa dianggap selesai manakala para konglomerat itu menyerahkan agunan yang telah diberikan. Padahal hutang para konglomerat itu terbilang besar. BCA milik Sudono Salim, misalnya, bermasalah terhadap BLBI sebesar lebih dari 52 triliun. Agunan yang diserahkan hanya berkisar 20 triliun. Kalau MSAA ini diteruskan berarti ada uang BLBI sebesar 30 triliun yang akan hangus begitu saja. Belum group-group yang lain. Untuk itu, di dalam pemerintahan Gus Dur ini terdapat tuntutan kuat untuk meninjau ulang MSAA ini. Hanya saja, sampai di penghujung 2000, peninjauan ulang itu belum terselesaikan.

Dari kasus-kasus ini kita bisa melihat bahwa pemerintahan Presiden Gus Dur ini belum mampu merubah pola relasi antara ekonomi dan politik. Model *clientelism*, yakni relasi yang saling menguntungkan antara penguasa dan pengusaha masih kental sekali. Kebijakan-kebijakan pemerintah masih berpengaruh terhadap eksistensi dunia usaha, sementara itu dunia usaha juga masih memiliki pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

BAB VI

PENUTUP

Simpulan dan Saran:

1. Simpulan

Pertama, Gus Dur adalah presiden legitimate yang terpilih secara demokratis oleh MPR, tetapi basis dukungannya relatif kecil, PKB. Sehingga keberadaan Gus Dur, sangat bergantung pada bagaimana memperoleh dukungan dari kekuatan-kekuatan lain. Pemerintahan Gus Dur belum mampu membangun dukungan atau koalisi yang solid, melainkan sebaliknya. Poros Tengah, salah satu kekuatan politik yang sebelumnya mendukung, berbalik melakukan serangan-serangan. Bahkan berupaya menurunkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Pada Sidang Tahunan (ST) Agustus 2000 kelompok ini gagal merubah ST menjadi Sidang Istimewa (SI) sehingga kursi kepresidenan Gus Dur masih cukup aman. Tetapi, ancaman bahwa Gus Dur bisa saja diturunkan sebelum masa jabatannya habis, 2004, tetap saja menghantui. Masalah-masalah lain yang menambah ketidakpastian politik pemerintahan Gus Dur adalah belum terselesaikannya tuntutan rakyat Aceh dan Irian Jaya yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Konflik horisontal di Ambon, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan sejumlah daerah lainnya. Belum siapnya pemerintah pusat maupun daerah menerapkan kebijakan otonomi daerah. KKN dan ketidakpastian hukum di Indonesia.

Kedua, Gus Dur ternyata tidak mampu memanfaatkan pemerintahannya yang legitimate. Pemulihan ekonomi (*economic recovery*) yang sudah tampak pada pemerintahan Habibie, tidak dilanjutkan secara baik. Memang ada bukti perbaikan ekonomi, misalnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya nilai ekspor, dan relatif terkendalinya laju inflasi. Tetapi, ada juga bukti sebaliknya, misalnya masih rendahnya nilai rupiah dan indeks saham

gabungan, bahkan lebih rendah pada masa pemerintahan Habibie. Arus investasi langsung juga tidak membaik.

Ketiga, belum mampunya pemerintahan Gus Dur untuk memulihkan perekonomian tidak lepas dari kondisi politik yang masih tidak menentu. Berbagai masalah non-ekonomi itu pada akhirnya berpengaruh terhadap proses penyelesaian krisis ekonomi dan moneter. Para investor asing dalam situasi seperti itu enggan menanamkan modalnya ke Indonesia. Bahkan, ditengarai, adanya pelarian modal (*capital flight*) ke luar negeri. Bagaimanapun juga para pemilik modal menginginkan keamanan atas modal yang ditanamkannya. Modal merupakan *big factor* yang bisa merangsang Bergeraknya mekanisme pasar. Di pihak lain, pemerintahan Gus Dur juga belum mampu membangun tradisi baru mengenai hubungan ekonomi (para pengusaha) dengan politik. Terlihat dari belum terselesaikannya kasus BLBI, adanya MSAA yang lebih cenderung menguntungkan pengusaha, dan adanya penundaan proses pengadilan terhadap tiga konglomerat.

Keempat, krisis ekonomi dan moneter di Indonesia terjadi bersamaan atau diikuti oleh krisis politik. Secara teoritik krisis ekonomi dan moneter dapat segera terselesaikan apabila terdapat pemerintahan baru yang legitimate dan terbentuk melalui proses pemilu yang relatif demokratis. Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintahan Gus Dur belum mampu merubah pola hubungan ekonomi dan politik. Model clientalism, yakni hubungan saling menguntungkan antara penguasa dan pengusaha masih kental sekali. Kebijakan-kebijakan pemerintah masih berpengaruh terhadap eksistensi dunia usaha, sementara itu dunia usaha juga masih memiliki pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

2. Saran

Pertama, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan moneter, pemerintah memiliki peran untuk menciptakan kepastian politik sehingga stabilitas politik yang

merupakan salah satu prasyarat penting bagi bergeraknya mekanisme pasar bisa berjalan dengan baik.

Kedua, perlu dicari formula yang lebih baik relasi ekonomi dan politik. Relasi ekonomi dan politik yang diinginkan adalah sebuah relasi yang adil dan fair, negara bertindak sebagai arena di mana proses politik berlangsung secara *fair* dan adil. Terhadap kegiatan ekonomi, negara tidak melakukan intervensi yang mengganggu mekanisme pasar, yang dilakukan adalah sebatas pada bagaimana merangsang bergeraknya mekanisme pasar itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sasono dan Sritua Arif, (1984). *Indonesia: Ketergantungan dan Keterbelakangan*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Aspinall, Edward, (1988). "Opposition and Elite Conflict in the Fall of Soeharto," dalam Geoff Forrester dan R.J.May (eds), *The Fall of Soeharto*, Crawford House Publishing Bathurst, Sydney.
- Biro Humas KPU, (2000). *Pemilu Indonesia dalam Angka dan Fakta*, Th. 1955-1999, Jakarta, hal.192.
- Caparaso, James A dan Levine David L, (1992). *Theories of Political Economy*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Gilpin, Robert, (1987). *The Political Economy of International relations*, Princeton University Press, Princeton.
- Hettne, Bjorn, (1997). "Introduction: The International Political Economy of Transformation," dalam Bjorn Hettne (ed), *International Political Economy: Understanding Global Disorder*, Zed Books, London.
- Higgins, Benjamin, (1968). *Economic Development*, edisi kedua, WW Norton, New York.
- Hill, Hal, (1998). "The Indonesian Economy: The Strange and Sudden Death of A Tiger," dalam Geoff Forrester and R.J.May (eds), *The Fall of Soeharto*, Crawford House Publishing Bathurst, Sydney.
- Hill, Hal, (1996). *The Indonesian Economy Since 1966*, Cambridge University Press, Melbourne.
- Jackson, Karl D, (1978). "Bureaucratic Polity: A Theoretical Framework for the Analysis of Power and Communications in Indonesia," dalam Karl D.Jackson dan Lucian W.Pye (eds), *Political Power and Communications in Indonesia*, University of California Press, Berkeley.
- Kontan, (1999). *Dialog Ekonomi dan Politik Bersama 32 Pakar dan Pengamat*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Komai, Janos, (1992). *The Socialist System: The Political Economy of Communism*, Princeton University Press, Princeton.
- Kacung Marijan, "Pemenang Pemilu Tak Otomatis Berkuasa," *Jawa Pos*, 24 Mei 1999.
- MacIntyre, Andrew, (1992). *Business and Politics in Indonesia*, Allan & Unwin, Sydney.
- Meltzer, Allan H., (1991). "Introduction," dalam Allan H.Meltzer, Alex Cukierman, Scott F.Richard (eds), *Political Economy*, Oxford University Press.
- Muhammad Asfar dkk., (1999). *Kekerasan Politik Pada Pemilu 1999*, Hipotesa, Surabaya, 2000.

LAMPIRAN:

Nilai Ekspor Non-Migas Menurut Kelompok Barang (Ribu USD)

Kelompok Barang	1995	1996	1997	1998	1999	1999		2000	
						Nov.	Des.	Jan.	Feb.
1. Binatang hidup, produk hewani	1,677,939	1,674,362	1,781,448	1,769,606	1,607,426	128,657	118,197	117,353	117,451
2. Produk nabati	1,255,212	1,192,022	1,318,673	1,655,329	1,201,510	94,541	83,605	64,624	76,222
3. Lemak, minyak dan malam	1,526,677	1,625,720	2,394,400	1,292,780	1,748,950	126,774	150,632	98,904	144,454
4. Makanan, minuman, minuman keras dan tembakau	1,047,732	1,218,478	1,374,029	1,483,830	1,345,113	80,706	167,030	57,330	72,875
5. Produk mineral	2,805,117	2,708,525	3,423,693	3,647,037	2,998,747	284,722	219,983	499,875	213,142
6. Produk industri kimia dan industri sejenis	1,266,334	1,244,397	1,752,068	2,105,035	1,844,362	168,657	158,905	139,584	176,075
7. Plastik, karet dan barang dari plastik dan karet	2,819,261	2,822,072	2,709,363	2,364,987	2,103,997	172,259	195,481	158,417	190,617
8. Kulit dan barang dari kulit	299,080	237,983	311,476	319,527	306,735	24,310	30,248	17,574	30,939
9. Kayu, barang dari kayu dan barang anyaman	5,088,836	5,104,890	5,294,354	3,721,091	3,795,976	315,033	328,749	263,166	317,661
10. Pulp, kertas dan barang dari kertas	1,503,650	1,369,421	1,957,018	2,470,882	2,646,723	233,231	217,563	204,246	264,921
11. Tekstil dan barang tekstil	6,329,859	6,068,548	8,008,258	7,380,087	6,954,675	545,175	656,065	402,030	576,566
12. Alas kaki, tutup kepala, payung dan bunga tiruan	2,178,875	2,110,548	2,297,114	1,665,596	1,613,289	107,574	142,106	99,858	153,071
13. Barang dari batu, semen, gips, asbes, kaca, mika, produk keramik	363,540	362,039	468,790	525,345	565,406	36,686	39,594	34,824	45,459
14. Mutiara, batu permata, logam mulia dan perhiasan imitasi	457,990	360,485	802,604	2,184,596	561,375	54,438	47,870	44,353	56,654
15. Logam tidak mulia dan barang	1,846,287	1,874,640	1,879,647	1,995,056	2,012,857	178,124	188,433	145,019	215,101

terbuat dari logam tidak mulia									
16. Mesin dan pesawat mekanik, perlengkapan elektronik dan bagiannya	3,600,136	4,701,113	4,678,977	4,290,438	5,218,235	463,730	484,886	566,390	709,850
17. Kendaraan, pesawat terbang, kendaraan air dan perlengkapannya	507,354	497,061	633,310	999,154	749,699	30,973	42,316	35,457	37,825
18. Alat optik, fotografi, musik, kedokteran, bedah dan jam	306,239	460,386	460,010	412,094	372,661	34,480	32,282	27,274	34,317
19. Senjata dan amunisi, bagian dan kelengkapannya	720	4,644	3,902	2,604	3,304	6	115	3	79
20. Berbagai barang hasil pabrik	1,332,113	1,407,068	1,563,417	1,497,461	1,839,455	150,176	160,326	99,725	161,747
21. Karya seni, barang koleksi dan barang antik	1,538	1,182	20,191	76,137	19,919	306	491	378	562
J u m l a h	36,214,489	37,045,584	43,132,742	41,858,672	39,510,414	3,230,558	3,464,877	3,076,38	3,595,588

Lanjutan:

Kelompok Barang	2000							
	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September*	Oktober*
Nama dan jumlah barang seperti di atas	117,246	119,321	126,301	150,806	175,808	168,400	141,583	45,906
	70,913	70,064	87,585	101,245	129,641	128,086	119,302	25,155
	140,488	142,981	162,892	157,267	195,355	145,158	152,685	45,752
	77,427	69,805	95,724	243,897	127,692	113,427	107,688	31,220
	285,269	300,898	223,220	224,933	253,733	220,604	273,630	120,969
	204,296	163,300	195,690	211,129	200,253	208,434	186,746	59,301
	214,698	190,488	198,032	241,392	241,783	275,930	246,127	58,890
	32,653	30,236	36,935	45,678	36,860	39,082	33,62	6,007
	341,651	315,186	329,740	344,714	320,103	327,449	296,162	104,306
	277,386	267,262	281,417	281,472	249,134	348,577	244,244	67,252
	661,679	562,262	667,097	822,599	814,320	911,612	731,244	187,583
	189,332	145,531	155,309	160,194	150,556	147,644	124,964	20,209
	60,042	46,974	52,191	64,644	68,680	71,622	57,294	11,559
	49,048	35,254	33,880	35,381	57,294	42,011	39,345	25,265
	223,383	170,361	179,307	221,333	207,602	244,008	199,662	68,271
	880,902	686,480	979,339	833,235	854,147	992,807	953,816	133,163
	60,784	37,429	49,524	47,782	55,734	74,016	42,765	11,580
	62,084	38,091	44,691	40,250	42,420	46,362	45,742	6,152
	57	55	492	67	17	161	136	99
	250,156	170,090	193,933	187,309	174,137	189,699	175,579	42,795
	704	234	711	520	274	224	252	46
Jumlah	4,180,198	3,562,302	4,094,010	4,415,847	4,355,543	4,695,313	4,172,593	1,071,480

Rencana Penanaman Modal Asing (PMA) Yang Disetujui Pemerintah Menurut Sektor (Juta \$)

Periode	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			Pertambangan	Industri				
	Pertanian	Kehutanan	Perikanan		Makanan	Tekstil	Kayu	Kertas	Kimia & Farmasi
1995	1,153.0	0.0	231.2	0.0	1,331.8	471.1	263.0	2,540.5	19,404.4
1996	1,306.2	135.5	79.8	1,696.7	691.4	514.6	101.1	2,907.3	7,404.6
1997	436.6	0.0	27.1	1.6	572.8	372.6	69.7	5,353.3	12,376.4
1998	965.2	0.0	33.0	0.3	342.0	216.9	70.8	40.8	6,178.8
1999	412.7	8.8	69.7	14.1	681.0	240.2	113.2	1,411.8	3,268.2
1998									
Agustus	56.5	0.0	1.3	0.0	46.2	9.2	3.0	0.2	3,018.2
September	29.3	0.0	1.8	0.0	28.1	10.5	3.3	0.5	103.2
Oktober	82.2	0.0	0.0	0.0	15.3	22.4	0.4	0.0	13.0
November	0.0	0.0	3.9	0.0	0.4	3.3	13.5	0.0	34.9
Desember	28.5	0.0	4.6	0.0	3.5	10.7	5.8	3.7	6.1
1999									
Januari	9.8	0.0	1.8	0.0	59.4	12.5	9.9	3.0	2.9
Februari	3.8	0.0	0.0	0.0	15.0	8.5	14.2	0.0	8.3
Maret	6.2	0.0	48.7	0.0	22.7	24.2	10.5	0.8	50.4
April	32.4	8.8	2.6	0.0	35.0	5.5	1.8	6.8	28.0
Mei	34.4	0.0	0.0	0.0	77.3	15.5	4.8	21.2	47.7
Juni	21.8	0.0	1.0	4.4	26.0	16.1	22.0	7.3	12.3
Juli	36.0	0.0	0.0	0.0	13.0	21.0	6.0	1.4	7.8
Agustus	56.1	0.0	0.8	0.0	65.9	16.8	9.0	1,356.2	25.6
September	1.7	0.0	7.4	0.0	3.8	27.0	12.8	8.9	3,001.9
Oktober	95.8	0.0	1.5	1.8	233.0	17.6	12.8	1.6	40.6
November	40.0	0.0	2.8	0.0	69.0	48.3	4.7	0.2	26.4

Desember	74.5	0.0	3.1	8.0	60.6	27.4	4.6	4.5	16.5
2000									
Januari	0.4	0.0	0.0	0.0	27.9	10.0	6.6	0.0	20.8
Februari	15.0	0.0	0.0	0.0	3.3	8.9	6.0	0.3	99.5
Maret	0.7	0.0	3.6	0.0	65.7	185.3	11.8	5.1	34.1
April	65.9	0.0	3.7	0.9	20.7	13.6	62.3	1.5	13.6
Mei	0.6	5.0	5.6	0.0	19.9	14.7	8.9	11.5	9.6
Juni	0.1	0.0	1.0	0.0	10.0	15.7	5.3	0.6	31.6
Juli	17.2	0.0	1.5	0.0	41.3	35.9	1.3	51.9	2,963.0
Kumulatif 1967 – Juli 2000									
- Nilai	6,686.6	653.1	723.9	9,925.3	7,276.6	7,730.4	2,369.2	24,809.8	68,478.9
- Proyek	240	28	112	207	352	800	391	130	928

Lanjutan:

Periode	I n d u s t r i				Bangunan	Perho- telan	Pengang- kutan	Perumahan & Perkantoran	Listrik, Per- dagangan & Jasa- jasa lainnya	Jumlah
	Mineral non-logam	Logam Dasar	Barang Logam	Lainnya						
1995	289.3	291.7	2,258.1	42.2	205.8	998.8	5,539.5	1,192.0	3,702.3	39,914.7
1996	789.8	650.9	2,938.6	73.9	296.8	1,716.5	694.6	3,000.3	4,932.8	29,931.4
1997	1,457.3	357.0	2,331.7	126.5	306.8	462.6	5,900.0	1,397.6	2,282.9	33,832.5
1998	237.1	394.4	890.5	16.9	197.8	451.1	79.0	1,270.9	2,177.6	13,563.1
1999	110.4	501.3	593.0	10.2	153.4	228.6	102.7	179.4	2,791.9	10,890.6
1998										
Agustus	0.3	0.0	45.5	1.7	2.0	9.2	0.3	219.3	203.2	3,616.1
September	13.5	1.2	43.3	3.9	36.4	5.1	3.5	0.0	52.9	336.5
Oktober	0.8	0.0	120.6	0.7	0.0	3.0	0.0	22.4	22.1	302.9
November	0.0	0.0	21.1	0.2	2.2	4.9	1.8	122.1	19.5	227.8
Desember	0.6	0.8	48.6	2.0	1.4	28.6	2.8	119.5	132.5	399.7
1999										
Januari	4.6	0.0	55.8	0.3	9.3	11.1	0.2	0.0	13.8	194.4
Februari	0.0	0.0	37.0	0.3	0.0	22.1	3.0	15.7	17.2	145.1
Maret	0.0	6.2	65.0	4.5	1.5	21.2	29.1	40.0	75.7	406.7
April	3.9	0.0	12.9	0.0	7.9	3.5	29.4	9.0	28.7	216.2
Mei	0.0	410.1	9.7	0.0	2.5	0.6	0.5	0.0	29.6	653.9
Juni	5.5	1.2	6.0	0.1	0.2	5.9	13.6	62.2	27.9	233.5
Juli	27.7	62.8	46.3	0.4	1.8	13.5	1.1	4.9	22.9	266.6
Agustus	67.4	10.0	7.9	0.7	1.8	28.4	10.7	16.5	2,307.3	3,981.1

September	0.2	1.0	135.4	2.7	1.6	4.8	1.3	10.0	66.7	3,287.2
Oktober	1.0	10.0	61.4	0.0	1.5	78.5	3.4	0.3	126.0	686.8
November	0.0	0.0	73.3	0.4	123.0	2.1	0.4	11.1	46.0	447.7
Desember	0.0	0.0	82.4	0.7	2.2	36.9	10.0	9.8	31.0	372.2
2000										
Januari	0.0	0.0	15.8	0.5	1.0	0.1	0.9	2.5	13.4	99.9
Februari	0.0	0.0	42.9	0.0	0.5	1.5	2.8	20.7	28.2	229.6
Maret	7.8	0.7	41.7	1.1	16.4	3.5	13.8	13.4	67.1	471.8
April	0.4	705.3	33.8	1.2	58.1	0.0	18.7	49.2	35.9	1,084.8
Mei	0.0	29.0	16.8	0.2	7.5	5.9	0.7	2.0	29.7	167.6
Juni	0.0	2.5	47.3	0.0	1.4	1.0	85.2	14.9	43.2	259.8
Juli	0.0	56.7	345.6	0.1	2.7	16.9	16.1	1.8	173.2	3,725.2
Kumulatif										
967-Juli 2000										
Nilai	7,068.8	9,786.2	18,801.2	646.5	2,049.0	11,327.4	13,529.6	12,697.6	23,922.4	228,482.5
Proyek	166	136	1,337	136	376	331	279	221	2,278	8,448

Catatan :

1. Data tahunan bukan penjumlahan dari bulanan.
2. Data bulanan dan tahunan merupakan penjumlahan dari investasi baru, perluasan, dan alih status (sebelum 1991 belum termasuk alih status).
3. Data kumulatif investasi (sejak 1967) merupakan penjumlahan dari investasi baru, perluasan, alih status, perubahan, dan penggabungan dikurangi pembatalan.
4. Data kumulatif proyek (sejak 1967) merupakan penjumlahan dari proyek baru, alih status, dan penggabungan dikurangi pencabutan.

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Yang Disetujui Pemerintah Menurut Sektor (Miliar Rp)

Periode	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			Pertambangan	Industri				
	Pertanian	Kehutanan	Perikanan		Makanan	Tekstil	Kayu	Kertas	Kimia & Farmasi
1995	7,127.8	1,476.4	1,492.7	205.1	5,160.1	7,176.6	2,009.8	6,032.6	9,021.6
1996	15,283.8	45.6	742.1	460.1	13,748.3	3,365.8	1,128.9	12,763.9	13,392.7
1997	13,737.5	165.5	904.7	126.3	13,048.6	6,831.3	762.2	11,841.9	22,497.2
1998	4,757.9	542.9	14.3	116.3	6,711.8	1,137.6	1,971.9	12,754.1	15,583.2
1999	1,614.8	749.3	44.2	174.0	12,727.9	2,561.5	1,229.0	20,244.1	2,480.9
1998									
September	204.5	0.0	6.9	0.0	170.8	1.7	1,089.6	8,501.0	86.9
Oktober	3.6	0.0	0.0	0.0	918.7	290.0	458.8	60.1	214.5
November	140.8	0.0	0.0	0.0	159.4	35.4	2.1	226.0	14.0
Desember	181.3	542.0	0.0	0.0	519.8	90.6	34.0	0.0	278.3
1999									
Januri	147.3	35.3	0.7	0.0	138.4	143.8	0.0	0.0	10.2
Februari	3.1	0.0	0.0	0.0	578.7	25.4	8.7	7.7	8.0
Maret	30.2	0.0	0.0	20.0	1,224.4	19.5	23.7	0.0	196.0
April	68.0	0.0	3.5	0.0	300.4	0.0	0.0	0.0	58.3
Mei	407.1	0.0	0.0	10.0	224.9	10.0	20.7	0.0	15.0
Juni	20.0	0.0	26.3	0.0	7,422.0	166.3	37.4	0.0	23.6
Juli	0.0	0.0	425.0	0.0	140.0	122.5	13.5	12.5	700.0
Agustus.	385.9	280.0	10.0	0.0	1,001.7	251.8	0.0	5,305.0	155.7
September	0.0	0.0	0.0	0.0	858.1	120.6	249.4	17,399.0	719.1
Oktober	186.5	9.0	0.0	0.0	278.1	1,124.7	274.9	113.1	26.2
November	0.0	0.0	3.7	0.0	296.3	225.5	10.8	0.0	421.8

Desember	294.0	0.0	0.0	0.0	213.0	314.2	181.5	0.7	111.4
2000									
Januari	0.0	0.0	30.0	0.0	276.8	252.0	6.4	0.0	24.8
Februari	15.9	0.0	3.4	0.0	844.4	1,171.8	4.0	34.0	131.1
Maret	145.0	0.0	0.0	0.0	1,187.9	20.9	90.5	674.2	287.7
April	0.0	0.0	0.0	10.0	596.5	107.5	0.0	70.3	1,416.2
Mei	0.0	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	10.0	363.4	181.7
Juni	0.0	0.0	50.4	0.0	139.3	88.1	27.7	2.0	120.3
Juli	314.8	28.0	9.1	0.0	488.5	43.1	0.0	0.0	298.4

Lanjutan:

Periode	Industri				Bangunan	Perhotelan	Pengangkutan	Perumahan & Perkantoran	Listrik, Perdagangan & Jasa-jasa lainnya	Jumlah
	Mineral non-logam	Logam Dasar	Barang Logam	Lainnya						
1995	9,088.9	2,380.5	2,338.5	133.3	847.7	3,792.5	3,965.9	5,337.2	2,265.8	69,853.0
1996	7,964.8	4,460.7	2,375.9	16.7	1,550.0	5,019.3	3,065.7	9,425.6	5,905.3	100,715.2
1997	11,638.7	8,021.5	4,683.9	9.0	877.0	2,587.9	4,649.4	4,300.5	13,189.8	119,872.9
1998	3,469.0	1,786.3	960.9	533.2	1,992.0	1,150.4	3,260.5	1,547.5	2,459.5	60,749.3
1999	70.4	6,354.2	1,070.7	6.8	395.1	1,380.0	225.3	995.5	1,226.3	53,550.0
1998										
September	26.4	43.8	18.1	0.5	11.0	7.7	3.2	0.0	255.8	10,427.9
Oktober	0.0	0.0	42.0	0.0	403.8	0.0	1.1	0.0	14.5	2,407.1
November	220.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.2	0.9	40.5	427.0	1,441.3
Desember	0.0	0.0	1.2	10.5	0.0	0.0	15.4	139.0	0.4	1,812.5
1999										
Januari	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	0.0	0.0	328.0	0.0	1,006.2
Februari	0.0	1,162.5	15.6	0.0	0.0	0.0	9.8	160.0	1.1	6,980.6
Maret	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	20.0	11.5	0.0	31.5	1,605.4
April	25.6	0.0	36.9	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	23.6	529.3
Mei	32.2	0.0	21.5	0.0	2.5	41.5	0.2	32.0	108.3	925.9

Juni	0.0	78.8	56.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	264.5	8,095.4
Juli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	7.5	1,423.5
Agustus	0.0	0.0	45.4	0.0	47.8	416.0	0.0	0.0	28.5	7,927.8
September	0.0	0.0	110.0	5.6	0.0	1,040.7	0.0	0.0	507.4	21,009.9
Oktober	0.0	59.8	0.0	0.0	0.0	57.7	21.7	193.4	129.4	2,474.5
November	3.0	0.0	753.5	0.0	113.7	0.0	0.0	111.4	96.3	2,036.0
Desember	0.0	53.2	10.5	0.8	0.0	121.6	102.2	170.7	12.0	1,585.8
2000										
Januari	453.1	0.0	152.3	0.0	41.8	0.0	0.4	89.2	104.4	1,431.2
Februari	0.0	11.1	187.9	0.0	97.6	0.0	58.0	0.0	452.9	3,012.1
Maret	0.0	155.0	0.0	0.0	68.0	3.8	313.9	0.0	220.4	3,167.3
April	25.0	17.5	5.1	0.0	54.0	11.6	0.2	0.0	15.2	2,329.1
Mei	75.0	0.0	11.8	0.0	50.5	0.0	5.0	30.0	5.3	756.8
Juni	0.0	0.0	108.9	0.0	137.0	0.0	17.5	106.4	7.8	805.4
Juli	0.0	4.1	400.2	0.0	0.3	0.0	74.5	67.0	0.3	1,728.3

Catatan :

1. Data tahunan bukan penjumlahan dari bulanan.
2. Data bulanan dan tahunan merupakan penjumlahan dari investasi baru, perluasan, dan alih status (sebelum 1991 belum termasuk alih status).
3. Data kumulatif investasi (sejak 1968) merupakan penjumlahan dari investasi baru, perluasan, alih status, perubahan, dan penggabungan dikurangi pembatalan.
4. Data kumulatif proyek (sejak 1968) merupakan penjumlahan dari proyek baru, alih status, dan penggabungan dikurangi pencabutan.

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Rencana Penanaman Modal Asing (PMA) Yang Disetujui Pemerintah Menurut Negara Asal (Juta \$)

Periode	AMERIKA			ASIA										
	AS	Kanada	Lainnya	Hongkong	Jepang	Korsel	Malaysia	Philipina	Singapore	Taiwan	Thailand	China	India	Lainnya
1995	2,770.5	10.5	14.1	1,763.3	3,792.0	674.7	877.0	31.2	1,468.5	567.4	34.5	17.4	5.7	3.1
1996	642.1	35.8	76.6	1,105.6	7,655.3	1,231.4	1,393.3	3.1	3,131.0	534.6	1,610.6	20.3	21.8	1,664.3
1997	1,017.7	6.2	88.9	251.0	5,421.3	1,409.9	2,289.3	0.0	2,298.6	3,419.4	19.1	23.5	5.9	31.6
1998	568.3	8.1	123.2	549.0	1,330.7	202.4	1,060.2	62.5	1,267.4	165.4	2.8	7.6	14.9	10.8
1999	136.7	3.2	4.3	76.9	644.3	263.0	186.1	4.9	731.1	1,489.3	8.4	57.9	12.5	3,011.7
1998														
Ag.	236.0	1.8	0.0	57.8	177.4	3.5	29.8	0.0	22.5	11.6	0.0	0.6	0.0	0.0
Sep.	25.1	1.3	0.2	11.5	33.3	5.1	79.7	0.0	75.1	3.6	0.1	5.5	0.9	1.0
Okt.	1.4	0.3	0.0	0.0	68.5	24.9	61.1	0.0	25.0	5.8	0.0	0.0	1.0	4.3
Nov.	0.9	0.0	0.0	155.4	6.6	7.1	2.1	0.0	21.1	5.0	0.0	0.0	0.4	0.3
Des.	2.9	0.0	0.0	38.1	133.0	35.7	28.9	0.0	52.4	6.8	0.0	0.0	0.3	3.6
1999														
Jan.	1.4	0.0	0.0	5.6	21.0	11.3	0.2	0.0	21.1	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Feb.	3.6	0.0	0.0	0.0	46.2	11.4	1.2	0.1	1.0	10.8	0.0	0.0	0.4	0.5
Mar.	48.3	0.0	0.0	7.6	23.1	28.6	0.3	1.6	30.2	8.6	7.6	47.1	0.0	0.1
Apr.	0.9	0.7	0.3	0.0	42.1	14.2	60.7	0.0	16.5	13.4	0.0	0.3	0.1	5.7
Mei	0.3	0.0	3.5	0.5	6.2	11.2	40.4	0.0	12.8	4.9	0.0	0.6	0.4	0.1
Jun.	13.6	0.0	0.0	2.2	71.1	9.2	0.2	2.3	41.3	2.4	0.0	0.2	7.6	0.7
Jul.	13.5	0.6	0.0	2.4	37.2	17.8	1.0	0.0	75.2	5.2	0.8	2.1	0.9	0.0
Ag.	25.5	0.0	0.0	12.2	71.7	45.0	1.3	0.7	45.8	1,354.9	0.0	0.3	0.2	4.3
Sep.	20.9	0.0	0.0	2.6	103.9	24.6	1.0	0.0	23.5	17.3	0.0	0.3	1.3	3,000.0
Okt.	0.5	0.5	0.0	9.6	122.8	40.9	3.9	0.2	409.1	19.3	0.0	0.6	0.2	0.2

Nov.	3.7	1.9	0.0	0.0	85.2	7.0	54.6	0.0	12.3	31.2	0.0	2.0	0.0	0.0
Des.	4.5	0.0	0.0	34.2	13.7	41.2	21.5	0.0	42.3	13.8	0.0	4.4	1.3	0.0
2000														
Jan.	9.1	0.2	0.3	0.4	16.9	12.8	0.7	0.0	9.1	5.9	0.0	1.6	0.2	0.0
Feb.	8.5	0.0	0.0	0.0	42.6	13.4	18.5	0.0	10.0	1.1	0.0	22.4	0.9	0.5
Mar.	5.7	0.5	0.9	0.7	23.4	21.7	1.4	0.0	44.5	10.0	0.1	15.4	0.6	0.0
Apr.	57.9	0.0	5.0	0.0	727.4	9.6	0.4	0.0	94.7	7.2	2.5	18.7	0.5	0.2
Mei	0.2	0.0	0.0	1.0	37.9	12.8	7.0	5.8	18.5	5.5	0.0	0.2	1.3	0.3
Jun.	1.5	0.1	0.0	1.3	64.6	6.1	20.8	0.3	18.5	3.0	0.0	11.2	0.5	0.4
Jul.	9.7	0.9	0.0	100.1	360.5	69.3	35.1	0.0	45.3	3.0	0.0	32.9	53.1	0.2

Kumulatif

1967-Jul. 2000

- Nilai	10,449.2	156.7	1,036.5	14,594.4	36,586.1	9,490.0	7,035.3	165.2	19,190.2	16,100.7	1,781.8	382.3	284.4	4,899.2
- Proyek	397	109	44	404	1,179	936	366	26	1,094	809	38	84	99	68

Catatan :

1. Data tahunan bukan penjumlahan dari bulanan.
2. Data bulanan dan tahunan merupakan penjumlahan dari investasi baru, perluasan, dan alih status (sebelum 1991 belum termasuk alih status).
3. Data kumulatif investasi (sejak 1967) merupakan penjumlahan dari investasi baru, perluasan, alih status, perubahan, dan penggabungan dikurangi pembatalan.
4. Data kumulatif proyek (sejak 1967) merupakan penjumlahan dari proyek baru, alih status, dan penggabungan dikurangi pencabutan.

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pertumbuhan Ekonomi Tujuh Negara Industri Utama Dan Beberapa Negara Asia (Persen per tahun/Persen per annum)

Kelompok Negara	1995	1996	1997	1998	1999	1999			2000	
						Qrt.2	Qrt.3	Qrt.4	Qrt.1	Qrt.2
Negara-negara Industri	2.1	2.8	2.9	2.1						
Tujuh Negara Industri										
- Amerika Serikat	2.3	3.4	3.9	3.5	0.0	3.9	4.2	4.6	5.1	6.0
- Jepang	1.5	3.9	0.8	-2.5	0.0	0.7	0.9	...	0.7	0.8
- Jerman	1.2	1.3	2.2	2.6	0.0	1.0	1.2	2.3	3.3	3.1
- Inggris	2.7	2.2	3.4	2.3	0.0	1.2	2.9	3.0	3.0	3.1
- Italia	2.9	0.7	1.5	2.1	0.0	0.8	1.2	2.1	3.0	...
- Perancis	2.1	1.6	2.3	3.1	0.0	2.1	3.0	3.2	3.3	3.3
- Kanada	2.2	1.2	3.7	3.0	0.0	3.7	4.2	4.7	4.9	5.3
NI Es										
- Korea Selatan	8.9	7.1	5.5	-7.0	0.0	9.8	12.3	13.0	12.8	9.6
- Hongkong	3.9	4.6	5.3	-5.0	0.0	0.7	4.5	8.7	14.3	10.8
- Taiwan	6.0	5.7	6.9	4.0	0.0	6.5	5.1	6.8	7.9	5.4
- Singapura	8.7	6.9	7.8	1.3	0.0	6.7	6.7	7.1	9.1	8.0
A S E A N										
- Indonesia 1)	8.2	7.8	4.7	-13.0	0.0	3.3	0.9	5.8	3.2	4.1
- Malaysia	9.5	8.6	7.8	-6.4	0.0	4.1	8.1	10.6	11.7	8.8
- Thailand	8.8	5.5	-0.4	-8.0	0.0	3.5	7.7	6.5	5.2	...
- Philipina	4.8	5.7	5.1	-0.6	0.0	3.6	3.1	4.6	3.4	4.5

1) Berdasarkan harga dasar konstan 1993

Sumber:

- Badan Pusat Statistik/Central Bureau of Statistics (khusus Indonesia)
- World Economic Outlook, IMF (data tahunan/annually)
- The Economist (data triwulanan/quarterly)

Sjahrir, (1986). *Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok*, LP3ES, Jakarta, 1986.

Seminar The United States-Indonesia Society, "Parliamentary Election in Indonesia: Consensus, Coalitions, or Confusion?" di Washington pada 22 Juni 1999.

Staniland, Martin, (1985). *What is Political Economy? A Study of Social Theory and Underdevelopment*, Yale University Press, New Haven.

Sumawinata, Sarbini, (2000). *Sosialisme Kerakyatan: Suatu Ideologi, Aliansi Kerakyatan*, Surabaya.

Umar Basalim, dkk, (2000). *Perekonomian Indonesia: Krisis dan Strategi Alternatif*, Cidesindo, Jakarta.

Yahya Muhaimin, (1992). *Bisnis dan Politik*, LP3ES, Jakarta.

Majalah

Gatra, "Lampu Merah Buat Bung Rudy," 2 Oktober 1999.

Gatra, "Model Pelangi Bergaransi," 6 November 1999.

Gatra, "Oposisi Mengintip Kabinet," 26 Agustus 2000.

Gatra, "Pasang Surut Bursa Presiden," 9 Oktober 1999.

Swa, "Investasi Asing Langsung di Bawah Pemerintahan Baru," 26 Januari 2000.

Tempo, "100 Hari Pemerintahan Gus Dur: Banyak Bercanda Kisruh Bekerja," 30 Januari 2000.

Tempo, "Pembelaan itu Bisa Berbalik Jadi Bumerang," 5 November 2000.

PAMERAN

- 1 APR 2003

